KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN SULAWESI TENGAH

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Triwulan II 2021

Penyusun:
Penanggung Jawab: Irfa Ampri | Ketua Tim: Eko Erifianto
Editor: Eko Erifianto | Desain Grafis: Andi Dheayana Octavera
Anggota: Dedy Wahyu Winoto, Bayu Kusuma Putra, Aditya Dimas S, Andi Dheayana Octavera

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KAJIAN FISKAL REGIONAL (KFR) TRIWULAN II TAHUN 2021

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KAJIAN FISKAL REGIONAL
TRIWULAN II TAHUN 2021

SCAN BARCODE DI BAWAH INI UNTUK MENGUNDUH KFR TRIWULAN II TAHUN 2021 PROVINSI SULAWESI TENGAH SECARA DARING

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah
Irfa Ampri

KETUA TIM
Kepala Bidang PPA II
Eko Erifianto

PENULIS
Dedy Wahyu Winoto
Bayu Kusuma Putra
Aditya Dimas S

PENYAJI DATA
Dedy Wahyu Winoto
Bayu Kusuma Putra
Aditya Dimas S
Andi Dheayana Octavera

DESAIN GRAFIS
Andi Dheayana Octavera

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Tanjung Dako No. 15 Palu 94111
Telepon : (0451) 454040
Email : ppa2.kanwilpalu@gmail.com
Website : www.kanwildjpbsulteng.net

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan karunia-Nya Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2021 dapat disusun dan selesai tepat waktu.

Kajian Fiskal Regional Tahun ini merupakan *output* dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang pengelolaan fiskal sebagai bagian dari monev pelaksanaan anggaran pusat dan daerah yang menghubungkan antara implementasi kebijakan fiskal dengan perkembangan makro ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam proses penyusunan kajian ini, kami menggunakan data yang diperoleh dari berbagai pihak, antara lain pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, BPS Provinsi Sulawesi Tengah, BI perwakilan Sulawesi Tengah, satuan kerja vertikal maupun daerah, Ekonom Kementerian Keuangan Sulawesi Tengah dan sumber-sumber lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Oleh karena itu, kepada semua pihak tersebut kami mengucapkan terima kasih dan semoga kerja sama serta hubungan baik ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Dengan selesainya penyusunan Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2021 ini, kami berharap kajian tersebut dapat menjadi salah satu media informasi terkini yang bernilai strategis bagi mitra kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, baik satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Sulawesi Tengah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kami menyadari bahwa Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2021 masih belum sempurna dan masih membutuhkan banyak masukan membangun guna penyempurnaan hasil kajian di masa yang akan datang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palu, 05 Agustus 2021
Kepala Kanwil DJPb
Provinsi Sulawesi Tengah

Irfa Ampri

i. KATA PENGANTAR
ii. DAFTAR ISI
iv. DAFTAR GRAFIK
v. DAFTAR TABEL
vi. DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR BOX
vii. RINGKASAN EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto
3 Indikator Kesejahteraan

BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

5 Pendapatan Pemerintah Pusat di Daerah
8 Belanja Negara
10 Prognosis Realisasi APBN

BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

11 APBD Tingkat Provinsi
12 Pendapatan Daerah
15 Belanja Daerah
16 Prognosis Realisasi APBD

BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

18 Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
19 Pendapatan Konsolidasian
20 Belanja Konsolidasian

22 BAB V BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	PDRB ADHB Sulteng, Pertumbuhan Ekonomi Sulteng dan Nasional 2018 - 2021 (yoy)	**1**
Grafik 1.2.	Tingkat Inflasi Sulteng dan Nasional Januari-Juni tahun 2019, 2020, 2021	**2**
Grafik 1.3.	Tren Empat Komoditas Pembentuk Inflasi Triwulan II Tahun 2021	**2**
Grafik 1.4.	TPT 2017-2021, Pengangguran dan Pekerja Sementara Tidak Bekerja	**3**
Grafik 1.5.	Persentase Penduduk Miskin dan Gini Ratio Sulteng	**3**
Grafik 1.6.	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Sulawesi Tengah 2019-2021	**4**
Grafik 2.1.	Kontribusi Perpajakan terhadap Penerimaan	**6**
Grafik 2.2.	Realisasi Penerimaan PPh di Sulawesi Tengah	**6**
Grafik 2.3.	Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM	**6**
Grafik 2.4.	Realisasi Pajak Perdagangan Internasional	**7**
Grafik 2.5.	Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial TW II 2021 (Juta Rupiah) sertaTrennyaTahun 2019, 2020, dan 2021 (Persentase)	**8**
Grafik 2.6.	Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah TW II Tahun 2021 serta Tren Tahun 2019, 2020, dan 2021	**8**
Grafik 3.1.	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2021 (dalam Juta Rp)	**12**
Grafik 3.2.	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2021 (dalam Juta Rp)	**12**
Grafik 3.3.	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2021	**14**
Grafik 3.4.	Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2021	**14**
Grafik 3.5.	Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Semester I Tahun 2021	**15**
Grafik 3.6.	Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan II Tahun 2021	**16**
Grafik 3.7.	Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (Lima Urusan Tertinggi) Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan II Tahun 2021	**16**
Grafik 4.1.	Proporsi Penerimaan Konsolidasian	**19**
Grafik 4.2.	Perbandingan Proporsi Sumber Penerimaan Konsolidasian (miliar)	**19**
Grafik 4.3.	Proporsi dan Perbandingan Jenis Belanja Konsolidasian 2019 - 2021	**20**
Grafik 5.1.	Pembiayaan Sektor Perikanan Sulteng	**24**
Grafik 5.2.	Penyaluran Dana Desa s.d. Smt. I 2021	**24**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pagu dan Realisasi APBN Prov. Sulteng Triwulan II Tahun 2019, 2020 dan 2021 (miliar rupiah)	**5**
Tabel 2.2.	Perkembangan Realisasi PNBP BLU s.d. Triwulan II Tahun 2021	**7**
Tabel 2.3.	Realisasi KUR Per Wilayah Sulteng 2019 - 2021	**9**
Tabel 2.4.	Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Juta Rp)	**10**
Tabel 3.1.	APBD Lingkup Sulteng Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi, 2019-2021 s.d. Triwulan II Tahun 2021 (Rp miliar)	**11**
Tabel 3.2.	Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan IV Tahun 2021 (dalam Miliar Rp)	**17**
Tabel 4.1.	Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah s.d.Triwulan I Tahun 2021 (dalam miliar Rupiah)	**18**
Tabel 4.2.	Realisasi Belanja Konsolidasian dan Kontribusi PKP Triwulan II Tahun 2020 dan 2021	**20**
Tabel 4.3.	Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2021	**21**
Tabel 5.1.	Capaian Sektor Perikanan terhadap Beberapa Indikator Perekonomian	**23**
Tabel 5.2.	Target dan Realisasi PAD OPD Kelautan dan PerikananProvinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	**24**

DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR *BOX*

Gambar 5.1.	*Fishbone* Diagram Penyebab Pemilihan Sektor Perikanan Sebagai Sektor Potensial	**22**
BOX 1.	Perkiraan Tingkat Kemiskinan Sulteng Menggunakan Metode *Multiply Trend* Regresi Belanja Fungsi 2015-2020 Terhadap Kemiskinan	**4**
BOX 2.	Analisis Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Kinerja Realisasi Belanja APBN	**10**

DJPb
Indonesian Treasury

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro dan Kesejahteraan

Sejak Pandemi Covid-19 melanda perekonomian pada awal tahun 2020, tren pertumbuhan ekonomi Sulteng terus mengalami penurunan, namun seiring dengan membaiknya perekonomian nasional, mulai awal tahun 2021 perekonomian Sulteng mampu *bounce back* dan pada periode ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 8,52 persen (q-to-q) atau 15.39 persen (yoy). Capaian tersebut secara nasional juga menjadi kedua yang terbesar setelah Provinsi Maluku Utara (16,89 persen). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 18,59 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor sebesar 27,65 persen.

Laju inflasi di Sulawesi Tengah pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar 0,12 persen sedangkan tingkat inflasi kalender semester 1 adalah sebesar 0,66 persen. Pada akhir Triwulan II terjadi fluktuasi tajam menuju deflasi sebesar -0,67 yang disebabkan turunnya indeks harga konsumen pada Kelompok Bahan makanan, minuman, dan tembakau sebesar -2,03 persen serta Kelompok Transportasi sebesar -1,12 persen.

Menilik beberapa indikator kesejahteraan seperti Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, Ketimpangan, dan Nilai Tukar yang mengalami peningkatan positif dibanding periode sebelumnya, dapat diartikan bahwa kesejahteraan masyarakat Sulteng membaik pada Triwulan II Tahun 2021 dibanding periode sebelumnya.

Perkembangan dan pengaruh fiskal di daerah (APBN dan APBD)

Realisasi target Penerimaan Negara pada pada Triwulan II tahun ini mengalami peningkatan signifikan jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pada periode ini sebesar 59,5 persen dengan angka sebesar Rp2,62 triliun naik sebesar 24,5 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya terealisasi sebesar 35 persen dengan angka sebesar Rp2,06 triliun. Naiknya penerimaan negara disebabkan oleh naiknya seluruh komponen pajak dengan total kenaikan sebesar 32,01 persen, sementara PNBP disisi lain mengalami penurunan sebesar 5,5 persen dibanding tahun sebelumnya.

Dari sisi Belanja Negara, realisasinya sebesar Rp10,7 triliun atau mencapai 44,9 persen dari pagu, mengalami penurunan sebesar 0,7 persen bila dibanding periode yang sama tahun 2020. Defisit pada periode ini tercatat sebesar Rp8,09 triliun, atau turun sebesar 3,6 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp7,49 triliun (47,4 persen), turun sebesar

2,8 persen bila dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan realisasi Belanja dan TKDD disebabkan antara lain karena adanya beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah desa seperti adanya kasus hukum yang menjerat beberapa kepala desa, terlambatnya perdes tentang APBDes yang disahkan, adanya pergantian kepala desa, serta terlambatnya penghitungan dan penginputan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Realisasi anggaran pemerintah daerah (APBD) di Sulteng pada Triwulan II Tahun 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan baik pada sisi Penerimaan maupun Belanja. Realisasi pendapatan hanya Rp7,76 triliun atau 39,45 persen dari pagu, atau secara persentase turun 2,86 persen jika dibanding periode yang sama tahun 2020. Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp6,13 triliun, atau sebesar 29,77 persen dari pagu, mengalami penurunan sebesar 0,96 persen bila dibanding periode yang sama Tahun 2020. Sumber kontraksi terbesar disumbangkan oleh belanja tidak terduga yang turun sebesar 32,84 persen sementara belanja hibah merupakan belanja dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 32,01 persen.

Melihat perkembangan terkonfirmasi Covid-19 Sulteng yang mulai melonjak kembali pada akhir Triwulan II, diperkirakan Pandemi masih akan semakin berdampak terhadap perekonomian dan bukan tidak mungkin tren positif pada tahun 2021 pada triwulan selanjutnya terkontraksi dan perekonomian akan kembali seperti pada tahun sebelumnya. Melihat besarnya kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto dan tumbuhnya kontribusi konsumsi pemerintah dan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi Triwulan II, diprediksi pada triwulan selanjutnya aspek-aspek perekomian yang berhubungan dengan kinerja pemerintahan terutama belanja masih akan berpengaruh terhadap pertumbuhan Sulteng.

INDIKATOR MAKROEKONOMI SULAWESI TENGAH TRIWULAN II-2021

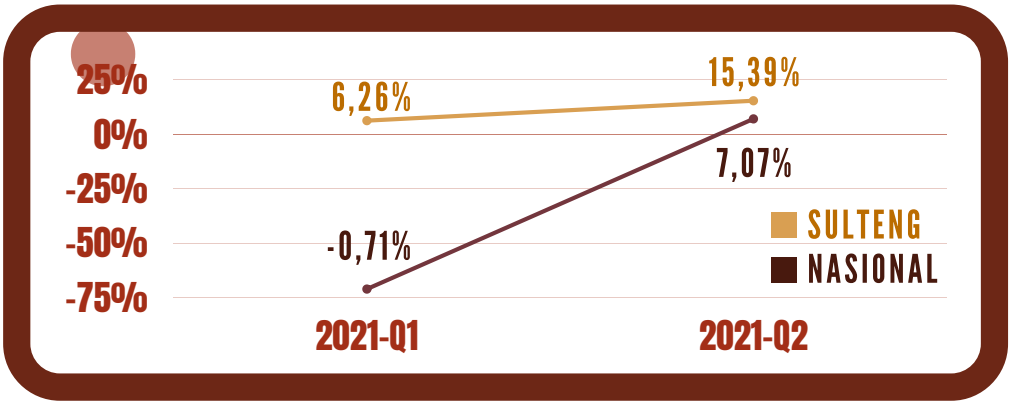

EKONOMI SULAWESI TENGAH MAMPU TUMBUH SEBESAR 15,39% (YOY) DI TENGAH TANTANGAN EKONOMI GLOBAL DAN REGIONAL

INFLASI

Faktor Deflasi akhir Semester I tahun 2021 adalah **turunnya IHK** pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi

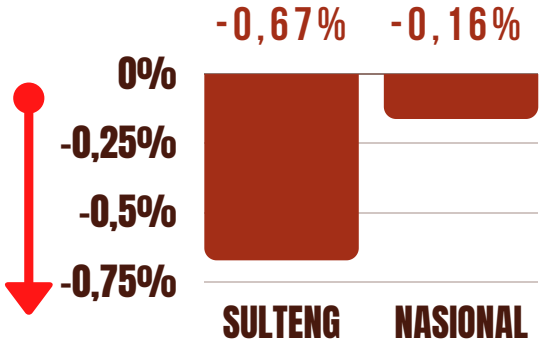

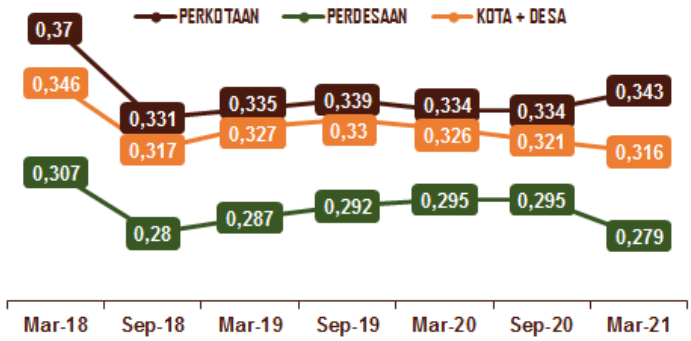

GINI RATIO

Pada bulan Maret 2021, tingkat ketimpangan menyentuh angka 0,316, turun 0,005 poin dari September 2020. Angka ini menunjukan tingkat ketimpangan pada kategori rendah baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan

68,93%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bulan Februari 2021 lebih rendah 0,51 persen poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2020

3,73%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bulan Februari 2021 lebih rendah 0,04 persen poin dibanding TPT Agustus 2020

99,68%

Nilai Tukar Petani (NTP) naik 1,57% dibandingkan NTP bulan sebelumnya

APBN DAN APBD SULAWESI TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2021

DJPb
Treasury Indonesia

APBN

PENDAPATAN NEGARA

Rp2,62 T
(59,50%)

BELANJA & TKDD

Rp10,70 T
(44,90%)

APBD

PENDAPATAN

Rp7,76 T (39,45%)

BELANJA DAERAH

Rp6,13 T (29,77%)

Gambar : Kota Palu
Sumber : Raja Drone ID

BAB I

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Gambar : Kakao Sulteng
Sumber : Metro Sulawesi

Gambar : Pertambangan Nikel di Morowali
Sumber : Dok/IMIP

RINGKASGRAFIS BAB I

LAJU PERTUMBUHAN

SULTENG TW 11-2021

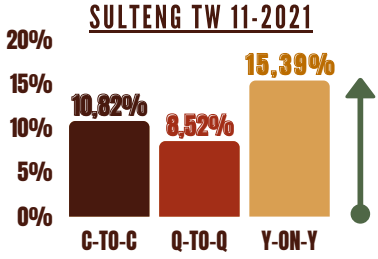

CAPAIAN PERTUMBUHAN SULTENG NAIK DAN MENJADI URUTAN KEDUA PERTUMBUHAN TERBESAR SE-NASIONAL

LAPANGAN USAHA

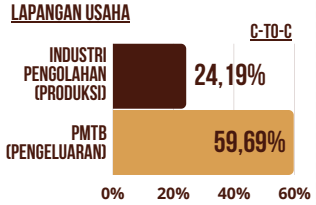

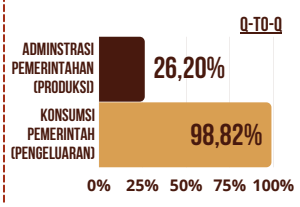

ADHB DAN ADHK SULTENG

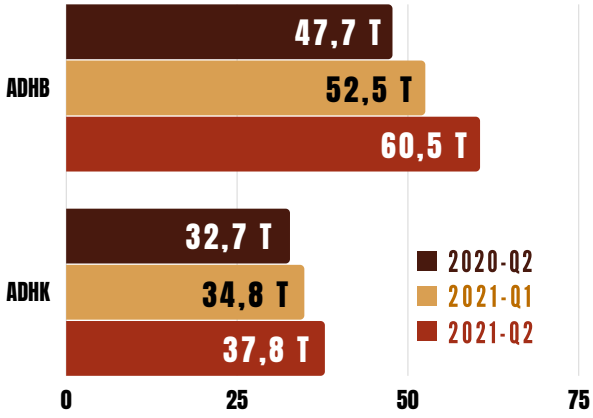

INFLASI

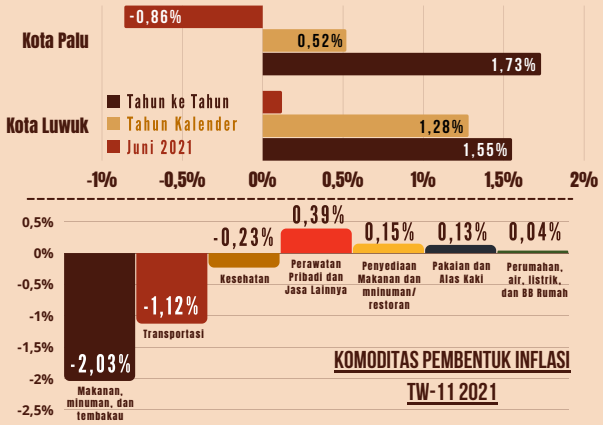

KOMODITAS PEMBENTUK INFLASI TW-11 2021

TPT & TPAK

ANGKATAN KERJA 1.575,39 RIBU -0,02%

BEKERJA 1.516,66 RIBU (+0,02%)

PENGANGGURAN 58,73 RIBU (-1,10%)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

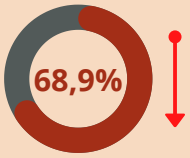

-0,51 dibanding TPAK bulan Agustus 2020

Tingkat Pengangguran Tebuka (TPT)

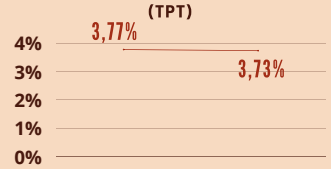

-0,04 dibanding TPT bulan Agustus 2020

DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDUDUK USIA KERJA

GINI RATIO

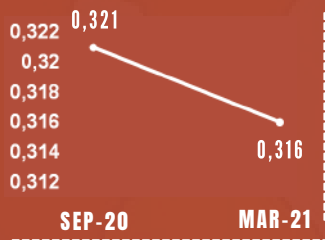

PENDUDUK MISKIN

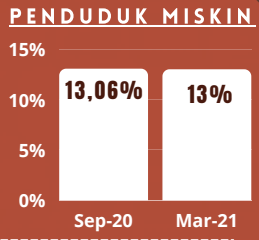

NTN

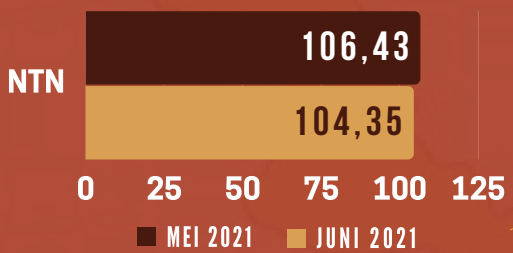

BAB I
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Triwulan II tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp60,48 triliun. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah Rp37,76 triliun. Melanjutkan tren positif sejak Kuartal IV tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Sulteng pada Triwulan II tahun ini jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (yoy) tumbuh sebesar 15,39 persen. Sementara jika dilitik dari pertumbuhan per-triwulan (q-to-q) ekonomi tumbuh sebesar 8.52 persen.

Grafik 1.1: PDRB ADHB Sulteng, Pertumbuhan Ekonomi Sulteng dan Nasional 2018 - 2021 (yoy)

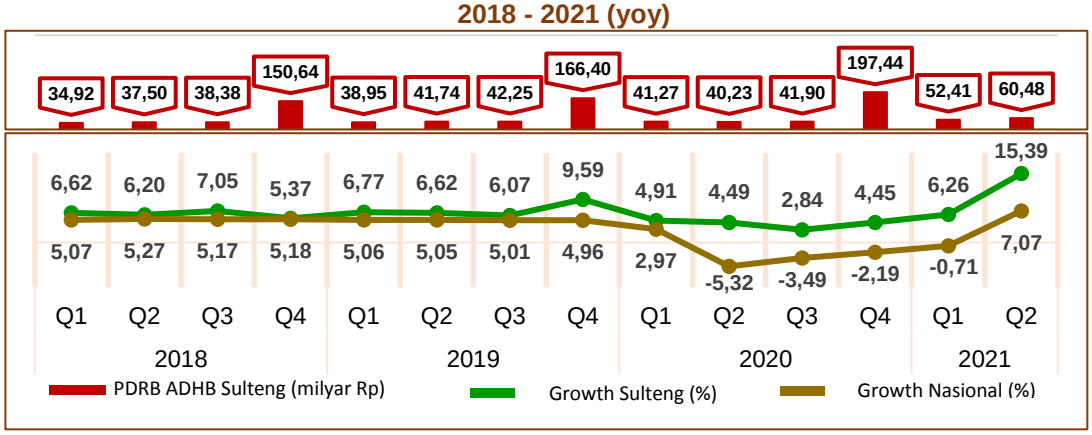

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS 2018-2021 (diolah)

Seperti dapat dilihat pada Grafik 1.1, sejak Pandemi Covid-19 melanda perekonomian pada awal tahun 2020, tren pertumbuhan ekonomi Sulteng terus mengalami penurunan, namun seiring dengan membaiknya perekonomian nasional, perekonomian Sulteng mampu *bounce back* mulai awal tahun 2021. Capaian pertumbuhan sebesar 15.39 persen merupakan yang terbesar kedua dalam 5 tahun terakhir bagi Sulteng setelah pada tahun 2016 lalu pernah mencapai angka 15,58 persen.

Capaian tersebut secara nasional juga menjadi kedua yang terbesar pada Triwulan ini setelah Maluku Utara (16,89 persen). Jika ditilik secara spasial, kontribusi Sulteng (PDRB ADHB) terhadap perekonomian regional Sulawesi Maluku dan Papua atau Sulampua jauh lebih besar, yaitu 15,54 persen dibanding Maluku Utara (3,15 persen), dan menjadi kontributor kedua terbesar setelah Sulawesi Selatan (35 persen).

Sektor Industri Pengolahan masih dominan dengan memberikan kontribusi pada PDRB Sulteng Triwulan ini sebesar 34,50 persen. Peningkatan aktifitas fiskal juga memberikan

dampak yang cukup signifikan bagi tumbuhnya perekonomian Sulteng dimana jika ditilik dari sisi lapangan usaha, Sektor Administrasi Pemerintahan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan q-to-q paling pesat (26.20). Peningkatan ini wajar jika menilik peningkatan realisasi triwulanan baik APBN maupun APBD pada Triwulan II yang detailnya dijelaskan pada bab selanjutnya. Sedangkan jika ditilik dari sisi struktur menurut pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan sektor dengan kontribusi paling besar (59,52 persen).

Inflasi

Pada bulan Juni tahun 2021, inflasi gabungan pada dua kota utama di Sulteng adalah sebesar -0,67 persen (deflasi). Sedangkan inflasi sepanjang Semester I adalah 0,66 persen. Grafik 1.2 menunjukkan tren inflasi Sulteng melandai dan hampir sepanjang Semester I, kecuali pada bulan Februari, selalu berada dibawah inflasi nasional. Dari grafik tersebut juga terlihat tren inflasi Sulteng tahun 2021, khususnya pada Triwulan II berbeda dari periode yang sama tahun 2019 dan tahun 2020 dimana Triwulan II tahun ini tingkat inflasi sangat fluktuatif dan terjadi penurunan tajam, hingga terjadi deflasi pada akhir Semester I.

Grafik 3.2. Tingkat Inflasi Sulteng dan Nasional Januari-Juni tahun 2019, 2020, 2021

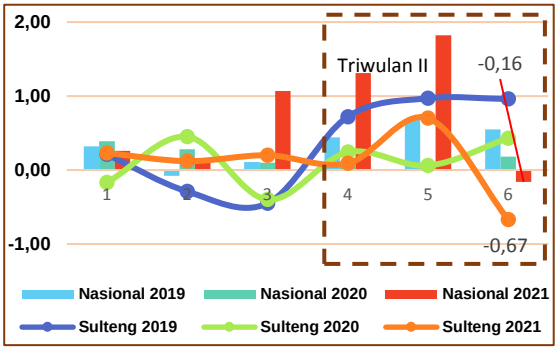

Grafik 2.3. Tren Empat Komoditas Pembentuk Inflasi Triwulan II Tahun 2021

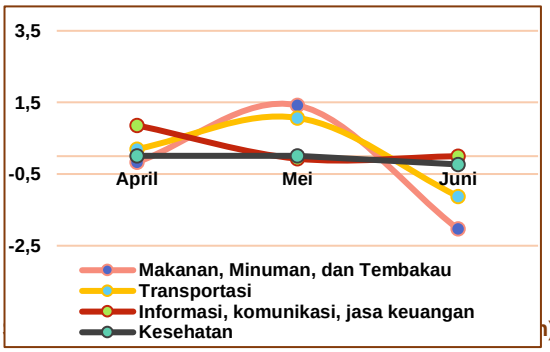

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS 2018-2021 (diolah)

Deflasi pada bulan Juni disebabkan terutama oleh turunnya indeks harga konsumen pada Kelompok Bahan makanan, minuman, dan tembakau sebesar -2.03 persen serta Kelompok Transportasi sebesar -1.12 persen (Grafik 1.3). Melihat tren penderita Covid-19 harian yang menanjak dan pengetatan kebijakan PPKM level 4, intervensi Pemerintah pada Triwulan III akan menjadi '*key factor and driver*' agar daya beli masyarakat meningkat. Pendapatan masyarakat yang meningkat akan mendorong naiknya harga-harga secara gradual yang selanjutnya akan berdampak pada stabilnya tingkat inflasi Sulteng pada kuartal berikutnya, dan memantik (*trigger*) para produsen untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasanya.

1.2 Indikator Kesejahteraan Ketenagakerjaan

Dampak pandemi terhadap aspek ketenagakerjaan Sulteng pada Semester I tahun 2021 juga mulai membaik. Pada Grafik 1.4, dapat dilihat sejak Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melonjak dengan sangat signifikan, dan menyamai TPT Agustus 2017. Namun, pada Triwulan II tahun 2021, TPT menurun tipis sebesar 0.04 persen atau sebanyak 650 orang menjadi 58.730 orang. Penurunan TPT tersebut diiringi dengan menurunnya angka pengangguran terdampak Covid-19 sebanyak 3.660 orang, dari sebelumnya 9.120 menjadi 5.460 orang. Selain hal tersebut, angka pekerja sementara tidak dapat bekerja karena Covid-19 juga mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun lalu sebanyak 11.420 menjadi 5.450 orang.

Grafik 1.4. TPT 2017-2021, Pengangguran dan Pekerja Sementara Tidak Bekerja

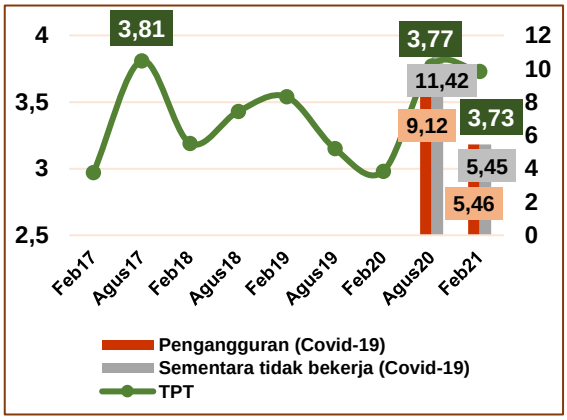

Grafik 1.5. Persentase Penduduk Miskin dan *Gini Ratio* Sulteng

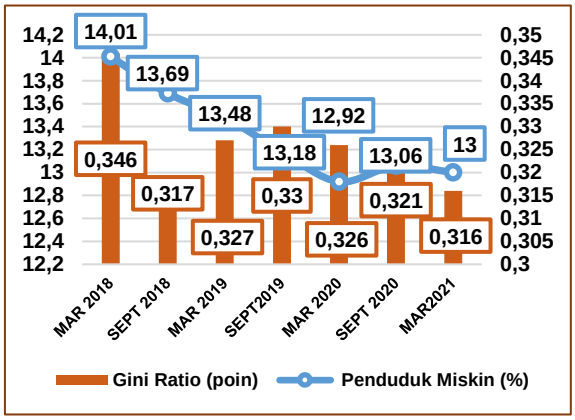

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

1.2.1 Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk

Grafik 1.5 menunjukkan bahwa sejak tahun 2018, perkembangan tingkat kemiskinan Sulteng secara umum mengalami tren penurunan, walaupun sempat mengalami kenaikan pada periode September 2020. Pada periode Maret 2021, kemiskinan di Sulteng turun sebesar 0.6 persen atau sekitar 700 orang sehingga menjadi 13% dari populasi. Turunnya tingkat kemiskinan dipengaruhi beberapa beberapa faktor yang terjadi pada Triwulan I antara lain pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi RT yang positif, turunnya TPT, dan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP).

Selaras dengan tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau *Gini Ratio* juga mengalami penurunan. Sejak September 2019, Indeks *Gini Ratio* terus mengalami penurunan hingga menyentuh 0,316 poin. Salah satu faktor penyebab turunnya ketimpangan dalam 6 (enam) bulan ini antara lain adalah karena meningkatnya pengeluaran pe rkapita seluruh penduduk, kecuali penduduk kelompok atas di daerah perdesaan yang turun sebesar -1,42 persen.

1.2.2 NTP dan NTN

Grafik 1.6 NTP, NTN, serta NTP Gabungan Sulteng 2019-2021

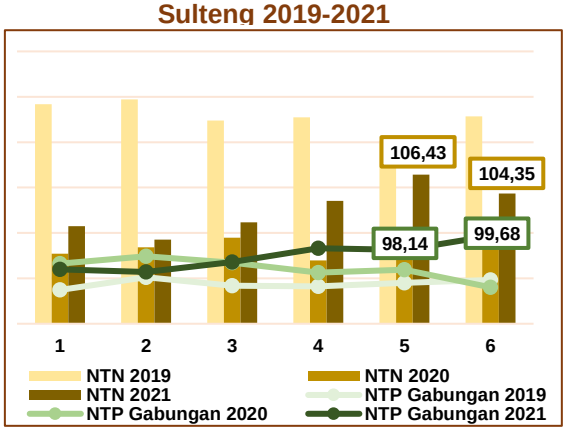

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Pada bulan Juni 2021, Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan mengalami peningkatan sebesar 1.54 persen. Sedangkan Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami kontraksi sebesar 2.08 persen. Namun secara keseluruhan jika ditilik tren tahun kalender sampai dengan Juni 2021, baik NTP maupun NTN, mengalami peningkatan. Bahkan tren NTP sampai tahun ini lebih baik daripada tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi. Sedangkan NTN, walaupun sempat turun drastis pada tahun 2020, akan tetapi jika melihat tren kenaikan sampai dengan akhir Semester I ini sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 1.6, pada akhir Semester II tahun 2021, capaian indeks NTN optimis diperkirakan akan kembali mendekati capaian tahun 2019.

Box I: Perkiraan Tingkat Kemiskinan Sulteng Menggunakan metode *Multiply Trend* Regresi Belanja Fungsi 2015-2020 terhadap Kemiskinan

Meskipun ekonomi tumbuh signifikan namun dalam 5 tahun terakhir tingkat kemiskinan Sulteng hanya turun sebesar -1,45 persen. Pemda menargetkan pada tahun 2026 angka kemiskinan menjadi sebesar 5,45 persen. Hasil penelitian Kanwil DJPB Sulteng (2021) menggunakan metode regresi dan data panel menyatakan bahwa empat fungsi belanja dan pertumbuhan ekonomi memliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemikinan Sulteng. Dengan menggunakan hasil tingkat konstanta masing-masing belanja tersebut yaitu Pendidikan (0,9234), perlindungan sosial (0,7328), PDRB (0,4716), Ekonomi (0,5367), dan Kesehatan (0,0484) yang berarti bahwa setiap peningkatan rata-rata 1 persen dari tiap variabel tersebut akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar sekian konstanta persen kemudian dihitung perkiraan tingkat kemiskinan pada tahun 2026 dengan asumsi pertumbuhan penduduk 1,67 persen (tren 2011-2017). Maka dengan tren kenaikan pagu belanja (2012-2020) fungsi Pendidikan 10.19 persen, kesehatan 32.65% Perlinsos -1.78, PDRB 1.24 persen, dan Ekonomi 42,22 persen pertahun maka jika laju kenaikan realisasi kelima variable tersebut konstan dikali tingkat konstanta regresi dan memperhitungankan laju kenaikan penduduk Sulteng maka kemiskinan sebesar 5.45 persen dapat diraih pada tahun 2024 dengan catatan setiap tahun belanja terealisasi penuh dan PDRB tumbuh 6,58 persen.

Gambar : Pelabuhan Pantoloan
Sumber : shipsap.co.id

BAB II

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

RINGKASGRAFIS BAB II

PENDAPATAN NEGARA Rp2,62 T

59,50% REALISASI S.D. TW-II 2021 +21,31% DIBANDING REALISASI TAHUN 2020

Perpajakan Rp2,36 T
58,20% +24,28%

PNBP Rp255 M
74,60% -5,88%

BELANJA dan DANA TRANSFER Rp10,70 T

44,90% REALISASI S.D. TW-II 2021 +2,36% DIBANDING REALISASI TAHUN 2020

B. Pegawai Rp1,24 T
50,70% +11,46%

B. Barang Rp1,16 T
+24,03% 35,90%

B. Modal Rp816 M
34,80% +46,45%

B. Bansos Rp171 JT
-30,99% 1,90%

TKDD Rp7,45 T
47,40% -7,31%

PENERUSAN PINJAMAN Rp1,76 M

TERDAPAT 2 (DUA) KABUPATEN DI SULAWESI TENGAH YANG MENERIMA PINJAMAN PEMERINTAH PUSAT YAITU KABUPATEN MOROWALI DAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KREDIT PROGRAM

KUR Rp1,2 T
39.109 Debitur
88,47% NAIK TERHADAP PERIODE YANG SAMA TAHUN LALU

UMi Rp507,1 JT
76 Debitur
98,20% TURUN TERHADAP PERIODE YANG SAMA TAHUN LALU

Prognosis Realisasi APBN s.d. TW IV-2021

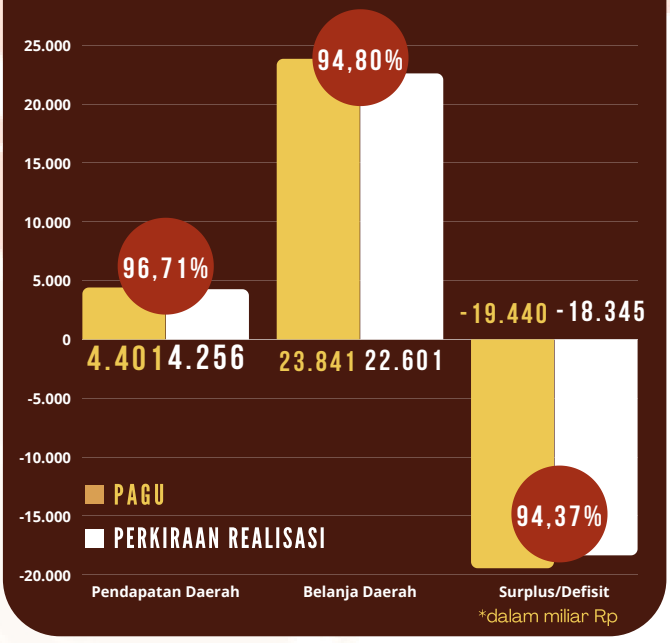

BAB II
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Kinerja keuangan Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Tengah terus membaik dan bertumbuh. Pada periode Triwulan II Tahun 2021, realisasi pendapatan negara di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai Rp2,6 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp558 miliar atau 27,07 persen bila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 (*y-on-y*). Sedangkan untuk Belanja dan Dana Transfer, telah terealisasi Rp10,70 triliun atau 44,9 persen dari pagu sebesar Rp23,84 triliun. Realisasi belanja pada periode ini mengalami kenaikan 2,42 persen dibandingkan tahun 2020 *(y-to-y)*. Sementara itu, defisit untuk periode Triwulan II tahun 2021 sebesar minus Rp8,08 triliun, turun 3,6 persen bila dibandingkan dengan defisit pada Tahun 2020. Data rincian pagu dan realisasi dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1. Pagu dan Realisasi APBN Prov. Sulteng Triwulan II Tahun 2019, 2020 dan 2021 (miliar rupiah)

Uraian	TA 2019			TA 2020			TA 2021		
	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
A. Pendapatan Negara	**4.532**	**2.103**	**46,4%**	**5.880**	**2.061**	**35,0%**	**4.401**	**2.619**	**59,5%**
I. Penerimaan Perpajakan	4.127	1.837	44,5%	5.171	1.790	34,6%	4.059	2.364	58,2%
II. PNBP	405	265	65,6%	709	270	38,1%	342	255	74,6%
B. Belanja dan Dana Transfer	**24.063**	**11.318**	**47,0%**	**22.908**	**10.451**	**45,6%**	**23.840**	**10.704**	**44,9%**
I. Belanja Pemerintah Pusat	**7.312**	**2.918**	**39,9%**	**6.898**	**2.416**	**35,0%**	**8.032**	**3.216**	**40,0%**
1. Belanja Pegawai	2.157	1.118	51,8%	2.481	1.097	44,2%	2.446	1.239	50,7%
2. Belanja Barang	2.913	1.272	43,7%	2.842	882	31,0%	3.231	1.161	35,9%
3. Belanja Modal	2.231	525	23,5%	1.567	437	27,9%	2.347	816	34,8%
4. Belanja Bantuan Sosial	11	2	21,4%	8	0	2,8%	9	0	1,9%
II. Transfer ke Daerah	**16.751**	**8.400**	**50,1%**	**16.011**	**8.035**	**50,2%**	**15.808**	**7.488**	**47,4%**
1. Transfer Dana Perimbangan	**14.984**	**7.322**	**48,9%**	**14.078**	**6.965**	**49,5%**	**13.841**	**6.720**	**48,6%**
a. Transfer DBH Pajak	328	110	33,4%	304	80	26,5%	266	179	67,3%
b. Transfer DBH Bukan Pajak/SDA	537	264	49,2%	935	101	10,8%	561	269	48,0%
c. Transfer Dana Alokasi Umum	9.996	5.791	57,9%	9.067	5.433	59,9%	8.942	4.821	53,9%
d. Transfer DAK Fisik	2.067	189	9,1%	1.725	255	14,8%	2.018	276	13,7%
e. Transfer DAK Non Fisik	2.056	968	47,1%	2.047	1.095	150,8%	2.055	1.175	57,2%
2. Dana Insentif Daerah	**199**	**141**	**71,1%**	**343**	**192**	**53,5%**	**370**	**185**	**50,0%**
3. Dana Desa	**1.568**	**937**	**59,8%**	**1.590**	**878**	**55,2%**	**1.598**	**583**	**36,5%**
C. Surplus Defisit Anggaran (A-B)	**-19.531**	**-9.216**	**47,2%**	**-17.028**	**-8.391**	**49,3%**	**-19.440**	**-8.086**	**41,6%**

Sumber : GFS Preleminary Triwulan II Tahun 2021 Kanwil DJPb Sulteng, OM SPAN, SIMTRADA, DJPK (diolah)

2.1 Pendapatan Pemerintah Pusat di Daerah

Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat untuk tingkat regional di Sulawesi Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp2,61 triliun, terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp2,36 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp255 miliar. Pendapatan perpajakan masih mendominasi besaran struktur penerimaan negara di wilayah Sulawesi Tengah sebesar 90,26 persen dari seluruh pendapatan.

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan meliputi semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, realisasi penerimaan perpajakan telah mencapai Rp2,36 triliun, mengalami kenaikan sebesar 32,01 persen dibandingkan dengan penerimaan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp1,7 triliun. Penerimaan perpajakan terus memberikan kenaikan kontribusi bagi total penerimaan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Grafik 2.1. Kontribusi Perpajakan terhadap Penerimaan

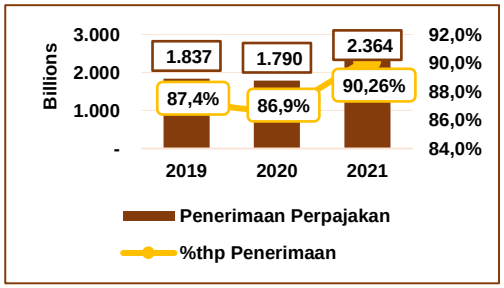

Sumber: GFS *Preleminary* Kanwil DJPb Sulteng, KPP di wilayah Prov. Sulawesi Tengah (diolah)

a) Pajak Dalam Negeri

Pajak Penghasilan (PPh)

Realisasi PPh pada TW II Tahun 2021 mempunyai kontribusi sebesar 63,38 persen terhadap pajak dalam negeri Sulteng. Angka ini mencapai Rp1,2 triliun, naik 41,14 persen jika dibandingkan penerimaan periode TW II 2020 sebesar Rp869 miliar. Pertumbuhan PPh dipengaruhi oleh tumbuhnya hampir seluruh akun penerimaan PPh seperti PPh pasal 21, 22, 23 dan Final.

Grafik 2.2. Realisasi Penerimaan PPh di Sulawesi Tengah

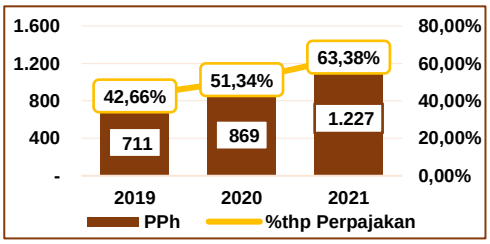

Sumber : GFS Preleminary Kanwil DJPb Sulteng, KPP di wilayah Prov. Sulawesi Tengah (diolah)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM

Realisasi PPN dan PPnBM mempunyai kontribusi sebesar 34 persen terhadap penerimaan pajak dalam negeri Sulteng. Angka ini mencapai Rp659 miliar, turun 17,76 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan TW II 2020. Penurunan kontribusi terutama PPn dalam negeri dikarenakan terdapat beberapa relaksasi perpajakan untuk mendukung program PEN.

Grafik 2.3. Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM

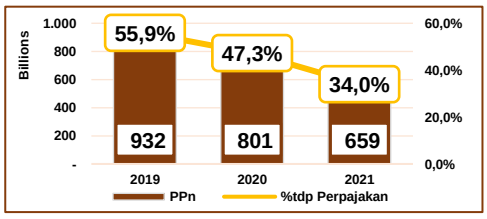

Sumber : GFS Preleminary Kanwil DJPb Sulteng, KPP di wilayah Prov. Sulawesi Tengah

Pajak Lainnya

Pajak ini terdiri dari pajak yang tidak termasuk dalam kategori di atas, diantaranya PBB Hasil Pertambangan, Pendapatan Bunga dan Denda. Realisasi pajak ini mencapai Rp50,3 miliar atau 2,62 persen dari penerimaan pajak dalam negeri di Sulteng.

b) Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional mempunyai kontribusi 22,10 persen terhadap penerimaan perpajakan Sulteng pada TW II 2021. Angka ini mencapai Rp428 miliar, naik 340 persen dibanding penerimaan pada TW II 2020 sebesar Rp97 miliar. Kenaikan signifikan ini dikarenakan terdapat kenaikan kontribusi penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar yang masing masing tumbuh sebesar 135 persen dan 1.917 persen sebagai dampak kegiatan ekspor impor yang tinggi di Sulteng.

Grafik 2.4. Realisasi Pajak Perdagangan Internasional

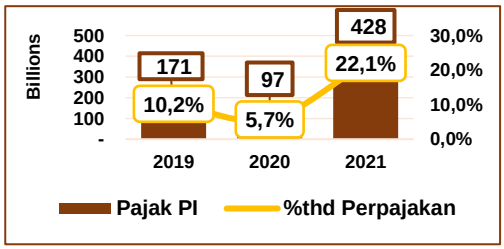

Sumber : GFS Preleminary Triwulan I-2021 Kanwil DJPb Sulteng, Kanwil DJP Sulteng (diolah)

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan PNBP di Sulteng sampai Triwulan II Tahun 2021 adalah Rp255 miliar, mengalami penurunan 5,55 persen dibanding penerimaan pada periode yang sama Tahun 2020 yang sebesar Rp270 miliar.

a) Penerimaan PNBP BLU

Tabel 2.2. Perkembangan Realisasi PNBP BLU s.d. Triwulan II Tahun 2021

Nama BLU	Jenis Layanan	Target Penerimaan	Realisasi	Persentase
Universitas Tadulako	Pendidikan	162.432.443.000	118.445.780.266	72,92%
Rumkit Bhayangkara	Kesehatan	18.646.437.000	7.189.019.546	38,55%
Bandara Mutiara Palu	Barang Jasa Lainnya	-	13.132.128.292	0%
Jumlah		**181.078.880.000**	**138.766.928.104**	**76,63%**

Sumber: OM SPAN (diolah)

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, penerimaan PNBP BLU di Sulteng mencapai Rp138,76 miliar. Universitas Tadulako mencatatkan realisasi penerimaan tertinggi diantara BLU di Sulteng yaitu sebesar 72,92 persen atau Rp118,44 miliar dari target penerimaan sebesar Rp162,43 miliar. Kontribusi utama atas capaian realisasi penerimaan dari Universitas Tadulako tersebut berasal dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan sebesar Rp115 miliar. Berikut perkembangan realisasi PNBP BLU di Sulteng s.d. TW II 2021.

b) Penerimaan PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP Lainnya sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp116 miliar atau 72,26 persen dari target PNBP Lainnya sebesar Rp161 miliar. Sumbangan PNBP Lainnya terbesar diperoleh dari Pendapatan Jasa Kepelabuhanan (18,50%), Pendapatan Biaya Pendidikan (15,50%), dan Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (8,10%).

2.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara lingkup Provinsi Sulteng pada Triwulan II Tahun 2021 adalah sebesar Rp10,70 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat Rp3,21 triliun dan TKDD sebesar Rp7,48 triliun.

1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Triwulan II 2021 sebesar Rp3,2 triliun, mengalami kenaikan 33,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Realisasi terbesar terjadi pada belanja pegawai sebesar 50,07 persen, belanja barang 35,09 persen dan belanja modal 34,8 persen. Adapun realisasi terendah adalah belanja bantuan sosial dengan realisasi sebesar 1,93 persen.

Grafik 2.5. Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial TW II 2021 (Juta Rupiah) sertaTrennyaTahun 2019, 2020, dan 2021 (Persentase)

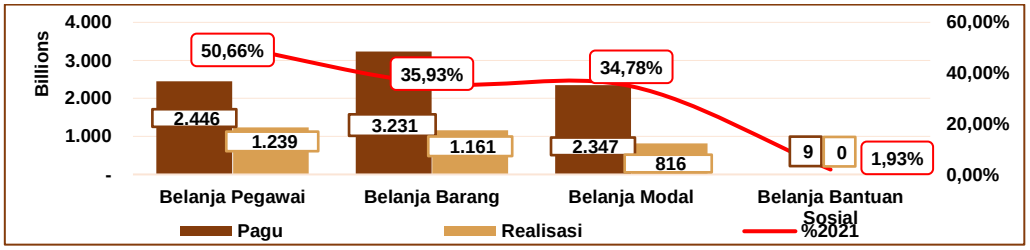

Sumber: GFS *Preleminary* Triwulan I 2021 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng, OMSPAN (diolah)

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Realisasi Penyaluran TKDD periode Triwulan II 2021 sebesar Rp7,48 triliun, turun 6,8 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Realisasi tertinggi adalah DBH Pajak dengan realisasi sebesar 67,3 persen, selanjutnya DAK Non Fisik sebesar 57,2 persen dan DAU sebesar 53,9 persen. Sementara itu, realisasi terendah adalah DAK Fisik dengan realisasi di angka 13,7 persen dari pagu sebesar Rp2,01 triliun. Tren penyaluran TKDD dari Tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada grafik 2.6.

Grafik 2.6. Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah TW II Tahun 2021 serta Tren Tahun 2019, 2020, dan 2021

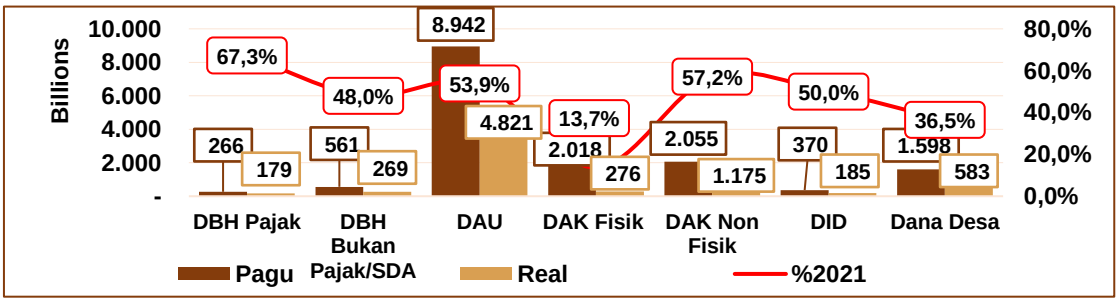

Sumber: GFS *Preleminary* Triwulan I-2021 Kanwil DJPb Provinsi Sulteng, OMSPAN, Simtrada (diolah)

Adapun realisasi Dana Desa pada periode ini baru mencapai Rp583 miliar, atau 36,5 persen dari pagu. Realisasi dana desa periode ini lebih rendah selama tiga tahun terakhir. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah

desa seperti adanya kasus hukum yang menjerat beberapa kepala desa, terlambatnya perdes tentang APBDes yang disahkan, adanya pergantian kepala desa, serta terlambatnya penghitungan dan penginputan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

3. Penerusan Pinjaman

Sampai Triwulan II Tahun 2021, terdapat dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki pinjaman dan sedang dalam proses pengangsuran dengan jumlah senilai Rp1,76 miliar. Total pinjaman tersebut terdiri dari dua pinjaman kepada dua Pemerintah daerah yaitu kepada Pemkab Parimo dengan hak tagih sebesar Rp 701,16 juta dan tingkat bunga sebesar 8.42 persen serta pinjaman kepada Pemkab Morowali dengan Hak tagih sebesar 1,06 miliar dengan tingkat bunga sebesar 10.15 persen.

4. Kredit Program

Pada periode TW II Tahun 2021, tercatat, KUR senilai Rp1,2 triliun telah disalurkan ke 39.109 debitur di Sulteng. Penyaluran pada periode ini mengalami pertumbuhan sebesar 88,47 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Jumlah outstanding pinjaman juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 282 persen dibandingkan TW II 2020 (yoy). Gencarnya sosialisasi dan banyaknya insentif usaha di masa pandemik, mendorong pelaku usaha untuk mengambil pinjaman KUR dibanding pinjaman lainnya.

Tabel 2.3. Realisasi KUR Per Wilayah Sulteng 2019 - 2021

NO	WILAYAH	2019		2020		2021	
		Debitur	Outstanding	Debitur	Outstanding	Debitur	Outstanding
1	Kab. Banggai	1.900	20.182.023.430	1.963	43.986.038.774	3.390	112.693.079.355
2	Kab. Bangkep	2.504	20.301.465.945	1.754	32.070.808.402	3.781	97.538.932.470
3	Kab. Banggai Laut	39	2.254.763.105	26	3.870.024.315	81	9.934.102.396
4	Kab. Buol	1.303	9.909.930.688	1.034	19.424.548.603	1.944	55.933.637.915
5	Kab. Donggala	1.627	18.966.849.874	1.634	30.921.735.950	4.565	144.180.804.674
6	Kab. Morowali	1.972	11.915.203.066	1.966	38.935.144.755	3.476	112.153.396.636
7	Kab. Parimo	6.131	44.396.437.800	5.447	98.712.447.680	8.225	216.154.597.834
8	Kab. Poso	2.582	26.899.838.772	1.911	36.846.751.263	3.767	101.934.874.546
9	Kab. Sigi	783	11.865.683.370	711	14.092.981.821	2.278	67.716.733.000
10	Kab. Touna	930	6.083.943.391	555	8.267.908.011	1.131	27.577.946.238
11	Kab. Toli-Toli	2.150	22.335.304.709	1.716	37.132.309.335	2.578	85.477.632.234
12	Kota Palu	1.357	24.840.586.897	2.034	63.671.477.087	3.796	173.170.310.636
13	Morowali Utara				-	97	5.667.726.459
TOTAL		23.278	219.952.031.047	20.751	427.932.175.996	39.109	1.210.133.774.393

Sumber : SIKP Kemenkeu (diolah)

Secara umum, penyaluran KUR di Sulteng masih didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 38,74 persen, disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 38,74 persen serta sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya sebesar 5,18 persen. Sementara sektor lainnya masih berada dibawah angka 5 persen.

Sementara itu, penyaluran UMi yang menyasar pelaku usaha mikro telah disalurkan sebesar Rp507,1 juta ke 76 debitur, namun penyaluran ini mengalami penurunan

signifikan sebesar 98,2 persen dari jumlah pinjaman periode TW II sebesar Rp29,1 miliar. Hal ini dikarenakan, pelaku UMKM beralih melakukan pinjaman dari UMi ke KUR. Penyaluran UMi tertinggi di TW II 2021 berada di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 12 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp88 juta, Kota Palu dan Kabupaten Tolitoli sebanyak 12 debitur dengan penyaluran masing-masing sebesar Rp77 juta dan 69,6 juta.

2.3 Prognosis Realisasi APBN

Proyeksi realisasi pendapatan dan belanja negara sampai akhir Tahun 2021 dihitung dengan membandingkan dua alat analisis yaitu ARIMA dan *trend analysis* dengan rentang data kurun waktu tahun 2015 s.d 2020 serta tren belanja awal Tahun 2021. Realisasi pendapatan diperkirakan sebesar 4,25 triliun dan realisasi belanja diperkirakan Rp22,6 triliun. Defisit anggaran diperkirakan sebesar minus Rp18,34 triliun.

Tabel 2.4. Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Juta Rp)

Uraian	Realisasi s.d. Triwulan II			Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV		
	Pagu	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu (Trend)	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu (ARIMA)
Pendapatan Negara	4.400.704	2.618.664	59,51%	4.255.921	96,71%	94,81%
Belanja Negara	23.840.967	10.704.434	44,90%	22.601.237	94,80%	92,27%
Surplus/Defisit	-19.440.262	-8.085.769	41,60%	-18.345.315	94,37%	91,59

Sumber : SIKP Kemenkeu (diolah)

Box 2 : Analisis Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Kinerja Realisasi Belanja APBN

Dalam rangka mengetahui dampak pandemic covid cara dan waktu kerja new normal terhadap kinerja realisasi belanja APBN, Kanwil DJPBN menguji 8 variabel bebas terhadap variable terikat realisasi belanja. 8 (delapan) variabel bebas yang digunakan antara lain Konsultasi, Revisi anggaran, Koordinasi, Perubahan Peraturan, Jadwal Kerja, Implementasi norma kerja baru, Jumlah SDM, dan Kualitas Kesehatan Pegawai. Sedangkan variable terikat menggunakan persentase realisasi belanja Satker Semester II Tahun 2020. Model diujikan kepada 90 responden melalui survey. Model tersebut dikonversi menjadi persamaan statistik sebagai berikut:

$$Rb=a+b_1KAC+b_2RAC+b_3KPC++b_4PKC+b_5JKK+b_6IPK+b_7JSDM+b_8KKS+e$$

Metode statistic yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan alat analisis eviews 10. Hasilnya adalah dari delapan variable yang berpengaruh signifikan terhadap realisasi belanja APBN Satuan Kerja adalah variable Jadwal Kerja (Sig 0,032) dan Kualitas Kesehatan Pegawai (0,040) sedangkan variable lain memiliki pengaruh namun tidak signifikan. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa pembagian WFO dan WFH pada satuan kerja serta kekhawatiran akan aspek kesehatan diri sangat mempengaruhi kinerja pegawai yang pada akkhirnya juga berpengaruh terhadap realisasi belanja APBN pada Satuan Kerja.

Gambar : Ilustrasi Covid-19
Sumber : Antara

Gambar : Gubernur Sulteng
Sumber : Humas Pemprov Sulteng

BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

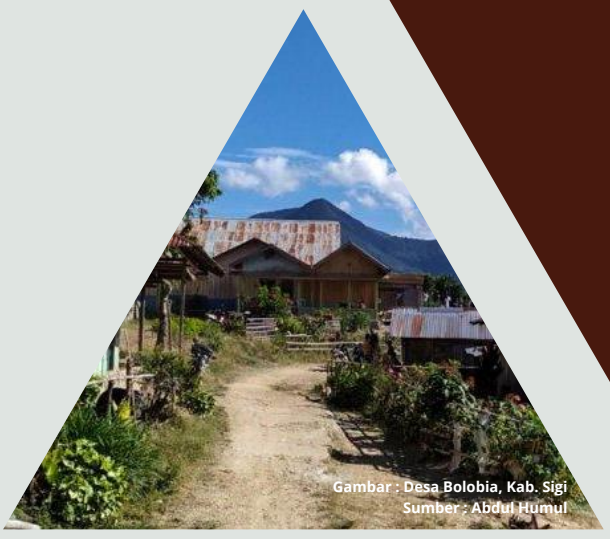

Gambar : Desa Bolobia, Kab. Sigi
Sumber : Abdul Humul

RINGKASGRAFIS BAB III

PENDAPATAN Rp7,76 T

39,45%

REALISASI S.D. TW-II 2021 -1,87%
DIBANDING REALISASI TAHUN 2020

PAD Rp917 M
34,31% +2,29%

Transfer Rp6,34 T
38,33% -9,25%

Lain-Lain Rp504 M
38,33% +94,84%

KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN RASIO PAD

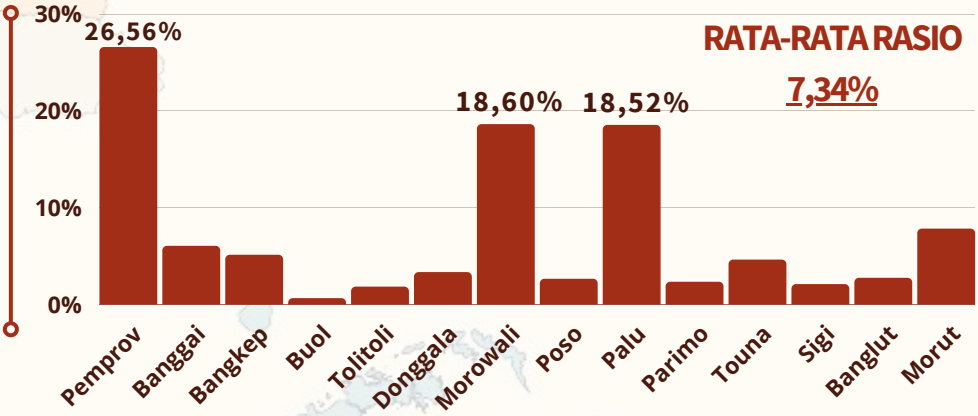

BELANJA DAERAH Rp6,13 T

29,77%

REALISASI S.D. TW-II 2021 -9,62%
DIBANDING REALISASI TAHUN 2020

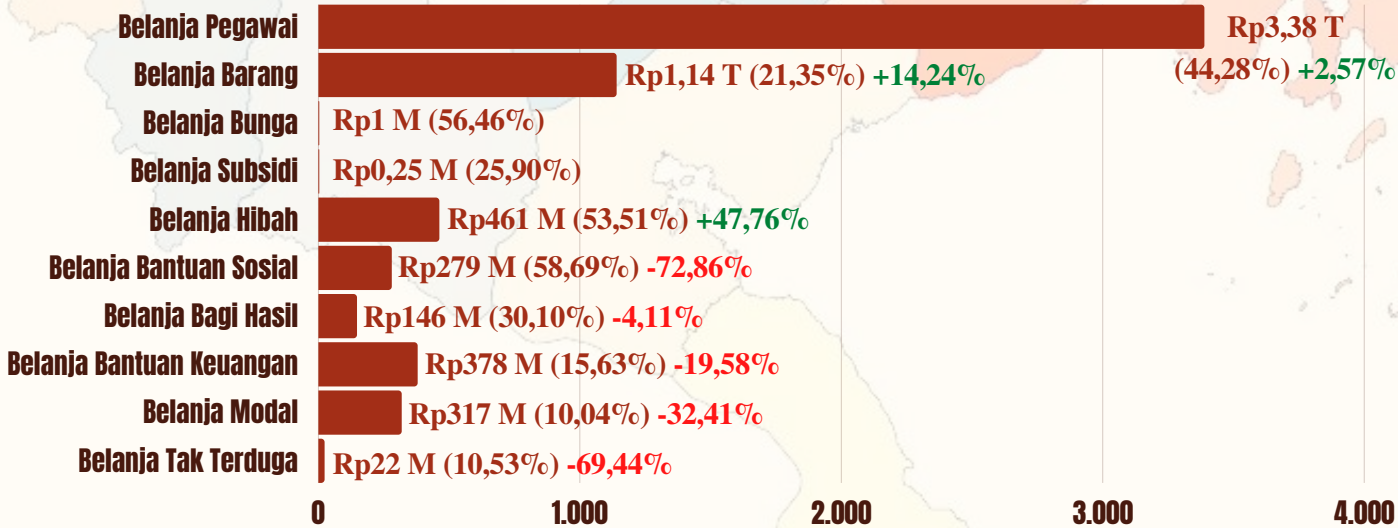

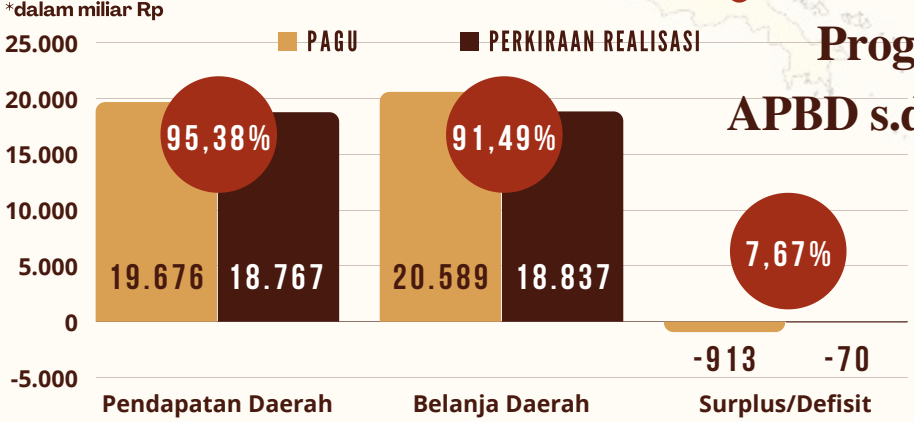

Prognosis Realisasi APBD s.d. TW IV-2021

BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

3.1 APBD Tingkat Provinsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. APBD diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Data profil berupa pagu dan realisasi APBD seluruh Pemda (provinsi/kabupaten/kota) di Sulteng Tahun 2019 - 2021 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. APBD Lingkup Sulteng Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi, 2019-2021 s.d. Triwulan II Tahun 2021 (Rp miliar)

I-Account (dalam Miliar Rp)	TA 2019			TA 2020			TA 2021		
	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
PENDAPATAN	**21.299**	**9.399**	**44,13**	**18.262**	**7.910**	**43,31**	**19.676**	**7.762**	**39,45**
Pendapatan Asli Daerah	2.413	809	33,53	1.406	896	63,73	2.672	917	34,31
Pendapatan Transfer	18.235	8.456	46,37	16.231	6.988	43,05	16.542	6.341	38,33
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	650	134	20,62	624	26	4,17	462	504	109,06
BELANJA DAERAH	**20.857**	**6.389**	**30,63**	**22.075**	**6.783**	**30,73**	**20.589**	**6.130**	**29,77**
Belanja Pegawai	8.103	3.259	40,22	8.047	3.300	41,01	7.648	3.387	44,28
Belanja Barang	4.562	1.251	27,42	4.119	997	24,20	5.332	1.139	21,35
Belanja Bunga	3	1	33,57	2	1	53,27	2	1	56,46
Belanja Subsidi	1	0	31,23	2	0	27,89	1	0	25,90
Belanja Hibah	735	361	49,12	1.451	312	21,50	862	461	53,51
Belanja Bantuan Sosial	45	6	13,64	1.934	1.028	53,15	475	279	58,69
Belanja Bagi Hasil	780	80	10,26	443	152	34,31	484	146	30,10
Belanja Bantuan Keuangan	2.139	885	41,37	2.436	452	18,56	2.422	378	15,63
Belanja Modal	4.459	536	12,02	3.474	469	13,50	3.155	317	10,04
Belanja Tak Terduga	32	11	34,38	166	72	43,37	208	22	10,53
SURPLUS/DEFISIT	**442**	**3.011**	**681,22**	**-3.813**	**1.127**	**-29,56**	**-913**	**1.632**	**-178,56**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**647**	**697**	**107,76**	**2.847**	**2.220**	**77,95**	**965**	**1.312**	**136,00**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**192**	**7**	**3,89**	**20**	**4**	**19,48**	**96**	**1**	**0,61**
PEMBIAYAAN NETTO	**455**	**689**	**151,49**	**2.827**	**2.216**	**78,37**	**869**	**1.311**	**150,98**
SILPA	**0**	**3.718**	**∞**	**0**	**3.342**	**∞**	**-45**	**2.944**	**-6.590,51**

Sumber: SIKD, DJPK Kemenkeu (diolah)

Realisasi pendapatan Semester I Tahun 2021 mengalami penurunan 1,87% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan disebabkan oleh menurunnya realisasi Pendapatan Transfer (9,25%) meskipun Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan mengalami kenaikan.

Realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan 9,62% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang disumbangkan dari penurunan Belanja Bantuan Sosial (72,86%), Belanja Tak Terduga (69,44%), dan Belanja Modal 32,41%. Adapun kenaikan realisasi belanja terjadi pada Belanja Hibah (47,76) dan Belanja Barang 14,24%.

3.2 Pendapatan Daerah

3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD seluruh Pemda di Sulteng pada Semester I Tahun 2021 adalah Rp916,69 miliar, 34,31% dari target (Rp2,67 triliun), dan berkontribusi 11,81% dari seluruh pendapatan daerah. Realisasi PAD mengalami kenaikan Rp21 miliar, atau 2,34 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp896 miliar.

3.2.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah mencapai Rp619,82 miliar, atau naik 9,55% dibandingkan periode yang sama tahun 2020, dan menyumbang 67,62% PAD di Sulteng. Tren pajak daerah per bulan pada Semester I Tahun 2021 untuk setiap kabupaten/kota tersaji pada Grafik 3.1.

Grafik 3.1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2021 (dalam Juta Rp)

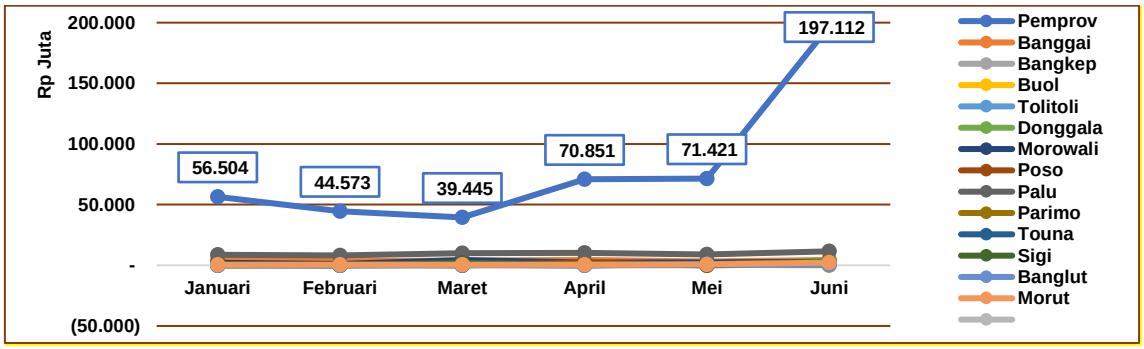

Sumber: SIKD, DJPK Kemenkeu (diolah)

Realisasi pajak daerah Pemda Provinsi Sulteng mencapai Rp479,91 miliar, atau 77,43% dari total penerimaan pajak daerah. Kontribusi terbesar ke 2 dan ke 3 dicapai oleh Kota Palu (9,29%) dan Kabupaten Banggai (3,89%). Sedangkan Kabupaten Banggai Laut membukukan pajak terendah (0,19%).

3.2.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Grafik 3.2. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2021 (dalam Juta Rp)

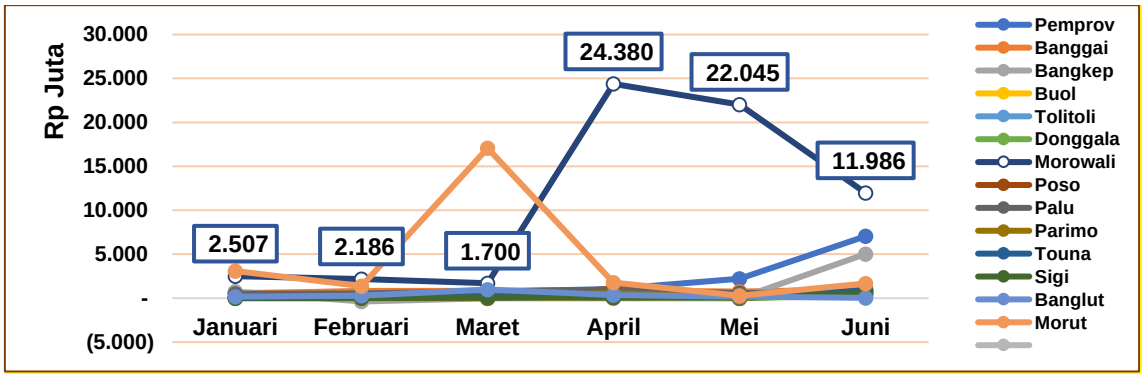

Sumber: SIKD, DJPK Kemenkeu (diolah)

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah (RD) mencapai Rp126,03 miliar atau mencapai 39,43% dari target Tahun 2021, dan berkontribusi 13,75% dari PAD Sulteng. Capaian naik 26% dibanding capaian di periode yang sama Tahun 2020. Tren RD setiap kabupaten/kota di Sulteng tersaji pada Grafik 3.2.

Realisasi RD tertinggi berasal dari Kabupaten Morowali (51,42%) dari total penerimaan RD di Sulteng dengan sumber RD berasal dari IMB dan Perpanjangan IMTA. Kontribusi terbesar berikutnya dicapai oleh Kabupaten Morowali Utara (20,02%) dan Pemprov Sulteng 9,68%. Sedangkan realisasi, RD terendah terdapat di Buol (0,33%).

3.2.1.3 Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan lingkup Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp35,44 miliar dan telah mencapai 73,07 persen dari target penerimaan hasil kekayaan daerah tahun 2021. Realisasi terbesar dicatat oleh Pemprov Sulteng yang menyumbang 54,80 persen dari total realisasi keseluruhan Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Terdapat 5 pemda yang realisasinya masih nihil, yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Morowali Utara.

3.2.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp135,39 miliar atau 14,63 persen dari target. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar minus 41,38 persen jika dibandingkan penerimaan pada periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp231,02 miliar.

Tiga daerah yang meberikan kontribusi terbesar adalah Kota Palu sebesar Rp46,97 miliar (34,70%), Pemprov Sulteng sebesar Rp37,63 miliar (27,79%), dan Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp16,71 miliar (12,35%). Sedangkan posisi terendah ditempati Kabupaten Buol sebesar Rp512 juta (0,38%).

3.2.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pada Triwulan II Tahun 2021, rata-rata tingkat kemandirian keuangan pemda berdasarkan rasio realisasi PAD terhadap total pendapatan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah sebesar 7,34 persen mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar minus 2,98 persen (*q-to-q*) jika dibandingkan Triwulan I Tahun 2021 sebesar 10,32 persen. Tingkat kemandirian tertinggi berturut-turut dicapai oleh Pemprov Sulteng (26,56 persen), Kabupaten Morowali (18,60 persen) dan Kota Palu (18,52 persen), dan. Jika dianalisis lebih jauh, dengan tidak memasukkan data penerimaan PAD pada ketiga pemda tersebut, maka rata-rata kemandirian keuangan daerah hanya sebesar 3,55

persen. Secara terinci kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tersaji pada Grafik 3.3.

Grafik 3.3. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2021

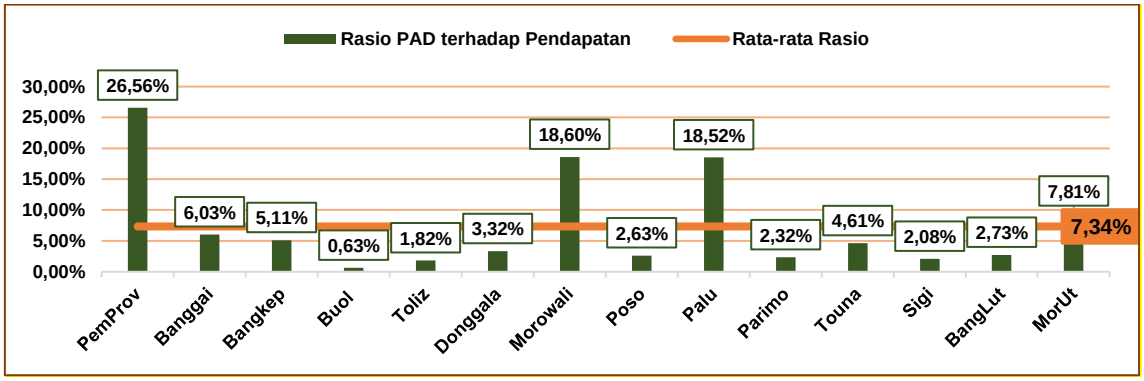

Sumber: SIKD, DJPK Kemenkeu (diolah)

Nilai rata-rata rasio kemandirian yang hanya sebesar 7,34 persen menunjukan masih tingginya tingkat ketergantungan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah terhadap TKDD dari Pemerintah Pusat.

3.2.3 Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp6,34 triliun atau mencapai 38,33 persen dari target sebesar Rp16,54 triliun. Capaian ini lebih rendah 9,16% dibanding periode yang sama tahun lalu, dan penyebabnya antara lain keterlambatan Pemda dalam menyampaikan Perda APBD sebagai syarat penyaluran TKDD ke daerah.

Pendapatan transfer memberikan kontribusi tertinggi bagi pendapatan daerah sebesar 81,69 persen. Realisasi pendapatan transfer terhadap pagu transfer masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tersaji pada Grafik 3.4.

Grafik 3.4. Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2021

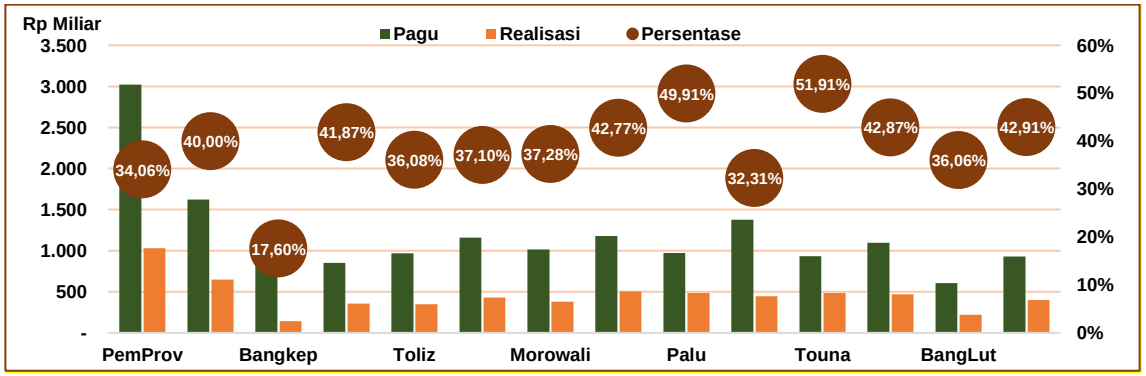

Sumber: SIKD, DJPK Kemenkeu (diolah)

3.2.4 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Dana Perimbangan

Grafik 3.5. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Semester I Tahun 2021

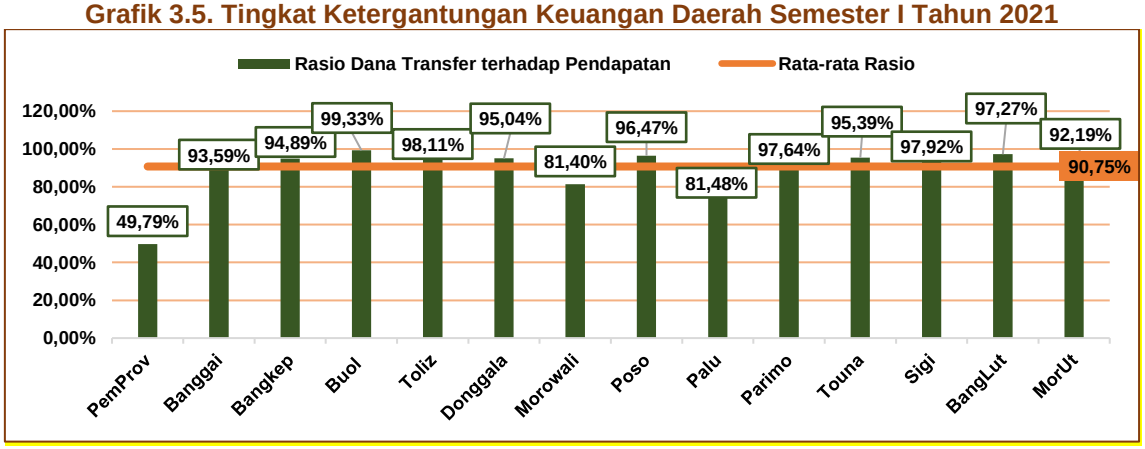

Sumber: SIKD, DJPK Kemenkeu (diolah)

Hampir seluruh Pemda di Sulteng memiliki PAD yang cukup rendah dan sangat bergantung kepada dana transfer. Hal ini terlihat dari rata-rata tingkat kemandirian pendapatan terhadap dana transfer Triwulan II Tahun 2021 yang masih sangat tinggi, yaitu sebesar 90,75 persen. Rasio perbandingan pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah Triwulan II Tahun 2021 tersaji dalam Grafik 3.5 di atas.

3.2.5 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp504,16 miliar atau 109,06 persen dari target penerimaan sebesar Rp462,28 miliar. Realisasi ini memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah sebesar 6,50 persen. Pemprov Sulteng memberikan kontribusi terbesar dengan nilai realisasi sebesar Rp488,94 miliar (96,98 persen) yang berasal dari penerimaan lain-lain pendapatan sebesar Rp478,79 miliar.

3.3 Belanja Daerah

3.3.1 Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Alokasi belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp20,58 triliun dengan alokasi terbesar terdapat pada Belanja Pegawai Rp7,65 triliun (37,15 persen), Balanja Barang dan Jasa Rp5,33 triliun (25,90 persen), dan Belanja Modal Rp3,15 triliun (15,32 persen). Realisasi belanja daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp6,13 triliun atau mencapai 29,77 persen dari alokasi belanja.

Sebagaimana terlihat pada Grafik 3.6, bila dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan II Tahun 2020, realisasi Belanja Pegawai mengalami pertumbuhan sebesar 2,63 persen, Belanja Barang dan Jasa juga tumbuh sebesar 14,24 persen, sedangkan Belanja Modal mengalami penurunan minus 32,41 persen.

Grafik 3.6. Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan II Tahun 2021

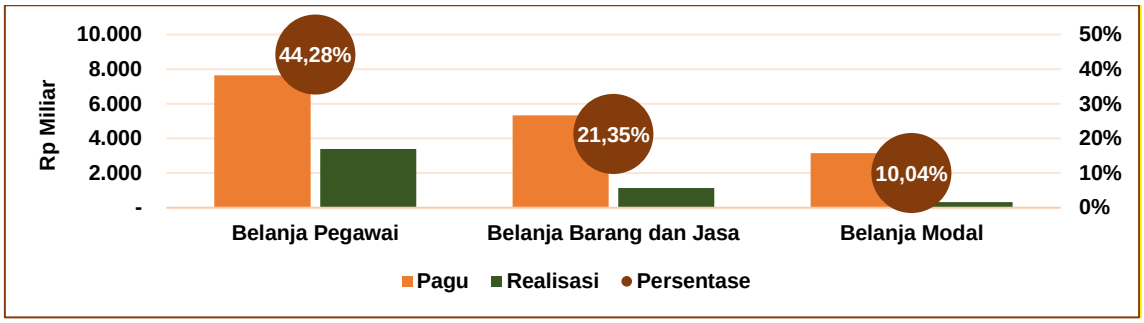

Sumber: SIKD, DJPK Kemenkeu (diolah)

3.3.2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Klasifikasi belanja daerah di Sulawesi Tengah terbagi dalam 29 belanja urusan. Alokasi dan capaian realisasi belanja pada Triwulan II Tahun 2021 untuk 5 urusan yang memperoleh pagu tertinggi disajikan dalam Grafik 3.7. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian memperoleh pagu tertinggi mencapai 47,39 persen dari pagu belanja tahun 2021 dengan alokasi Rp9,68 triliun. Capaian realisasi belanja urusan ini adalah sebesar 16,77 persen pada Triwulan II Tahun 2021. Urutan pagu alokasi urusan belanja tertinggi (berikut realisasi belanjanya) adalah Pendidikan (38,02 persen), Kesehatan (22,14 persen), Pekerjaan Umum (15,57 persen), dan Pertanian (31,02 persen).

Grafik 3.7. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (Lima Urusan Tertinggi) Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan II Tahun 2021

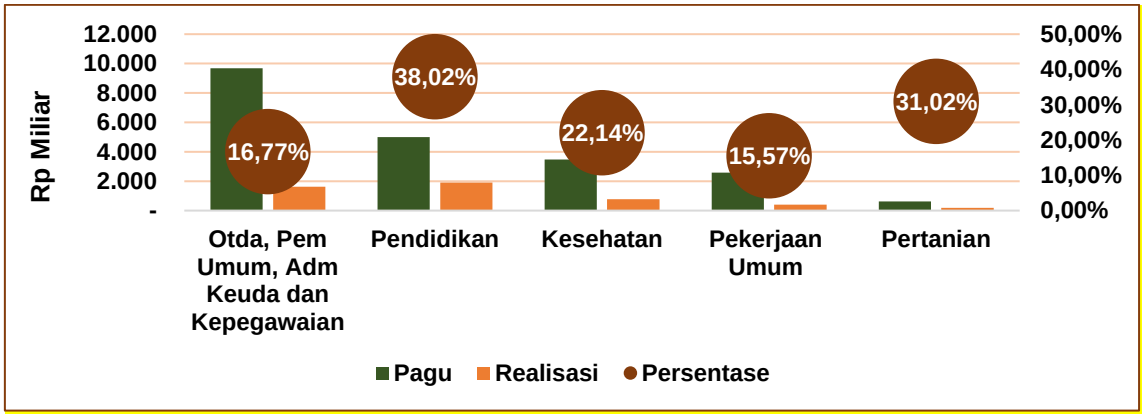

Sumber: SIKD, DJPK Kemenkeu (diolah)

3.4 Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020

Proyeksi realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan analisis trend dalam kurun waktu tahun 2015 s.d 2020. Berdasarkan analisis tren tersebut rata-rata realisasi pendapatan dan belanja daerah adalah 95,38 persen dan 91,49 persen.

Dengan demikian, diperkirakan pendapatan daerah dapat terealisasi sebesar Rp18,62 triliun dan belanja daerah terealisasi sebesar Rp21,10 triliun, sedangkan defisit anggaran diperkirakan sebesar minus Rp2,47 triliun.

Tabel 3.2. Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan IV Tahun 2021 (dalam Miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	19,676	7.762	39,45	18,767	95,38
Belanja Daerah	20,589	6.130	29,77	18,837	91,49
Surplus/Defisit	-913	1.632	-178,65	-70	7,67

Sumber: SIKD, DJPK Kemenkeu (diolah)

Defisit diperkirakan akan mengecil di akhir tahun anggaran 2021 antara lain disebabkan menumpuknya realisasi belanja daerah pada akhir tahun untuk mencapai target. Selain itu, banyaknya proyek kegiatan dan infrastruktur yang berakhir pada akhir tahun anggaran yang memerlukan percepatan pembayaran di triwulan IV. Seiring dengan hal tersebut, pendapatan daerah, terutama pendapatan transfer, juga akan terealisasi pada tahap akhir penyaluran menjelang batas akhir pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran dana transfer oleh pemda.

Gambar : Pabrik PT. Sawit Jaya Abadi
Sumber : Humas PT. Sawit Jaya Abadi

BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

RINGKASGRAFIS BAB IV

KONSOLIDASIAN

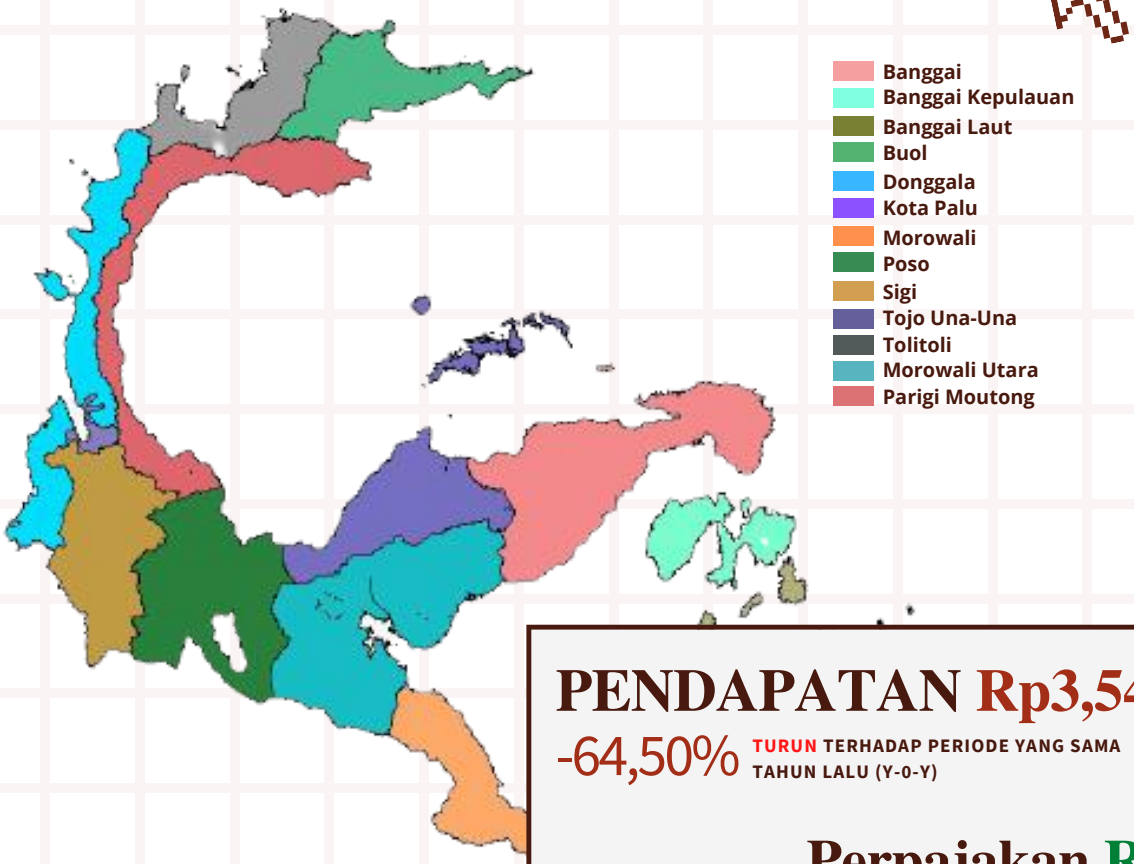

PENDAPATAN Rp3,54 T

-64,50% TURUN TERHADAP PERIODE YANG SAMA TAHUN LALU (Y-0-Y)

Perpajakan Rp2,98 T
+26,70%

PNBP Rp560,12 M
-92,60%

BELANJA dan TRANSFER Rp10,01 T

8,80% NAIK TERHADAP PERIODE YANG SAMA TAHUN LALU (Y-0-Y)

B. Pemerintah Rp8,83 T
+2,70%

Transfer Rp1,18 T
+95,50%

BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN KONSOLIDASIAN

4.1 Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, realisasi Pendapatan Pemerintahan Umum atau pendapatan konsolidasian tingkat Wilayah Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp3,54 triliun, mengalami penurunan sebesar 64,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp9,97 triliun. Dari sisi belanja konsolidasian, realisasi belanja mencapai Rp10,0 triliun, naik 8,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Defisit yang terjadi pada periode Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp6,46 triliun, turun sebesar 57,7 persen dibanding periode yang sama tahun 2020.

Tabel 4.1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah s.d.Triwulan II Tahun 2021 (dalam miliar Rupiah)

URAIAN	2019	2020	2021			%yoy
	Konsolidasi	Konsolidasi	Pusat	Daerah	Konsolidasi	
A. Pendapatan Negara	3.043.708	9.970.800	2.618.664	7.645.688	3.544.107	-64,5%
I. Penerimaan Perpajakan	2.356.402	2.354.624	2.363.548	620.444	2.983.992	26,7%
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	687.306	7.616.176	255.116	7.025.244	560.115	-92,6%
2. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan	41.076	22	0	33.287	33.287	151206,3%
3. PNBP Lainnya	203.925	252.923	116.349	126.076	242.425	-4,2%
4. Lain-lain PAD Yang sah	171.285	231.026	0	137.240	137.240	-40,6%
5. Pendapatan Transfer	23.651	6.988.075	0	6.720.246	0	-100,0%
6. Lain Pendapatan Daerah yang Sah	95.979	14.205	0	0	0	-100,0%
7. Pendapatan Hibah	12.440	12.391	0	8.396	8.396	-32,2%
8. Pendapatan BLU	138.948	117.535	138.767	0	138.767	18,1%
B. Belanja dan Transfer	9.230.884	9.199.688	10.704.434	6.024.578	10.008.767	8,8%
I. Belanja Pemerintah	8.341.836	8.595.941	3.216.190	5.612.135	8.828.324	2,7%
II. Transfer	889.048	603.747	7.488.244	412.443	1.180.442	95,5%
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	10.613.186	-15.298.949	-8.085.770	1.621.110	-6.464.660	-57,7%
D. Pembiayaan	689.487	2.215.694	0	1.180.827	1.180.827	-46,7%
I. Penerimaan Pembiayaan Daerah	696.939	2.219.622	0	1.181.410	1.181.410	-46,8%
II. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.452	3.927	0	583	583	-85,1%
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-(D+C)	11.302.673	-13.083.255	-8.085.770	2.801.937	-5.283.833	-59,6%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah (diolah)

Catatan: *) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah

A. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan Sumber Pendapatan Konsolidasian

Struktur Pendapatan konsolidasian Sulawesi Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 didominasi oleh pendapatan pajak dengan proporsi sebesar 84,2 persen dengan nilai Rp2,98 triliun. Sementara sebesar 15,8 persen atau Rp560 miliar disumbangkan oleh sektor PNBP. Penerimaan Perpajakan konsolidasian mendominasi seluruh penerimaan kecuali pada Tahun 2020 dikarenakan tidak ada akun eliminasi untuk pendapatan transfer daerah.

Grafik 4.1. Proporsi Penerimaan Konsolidasian

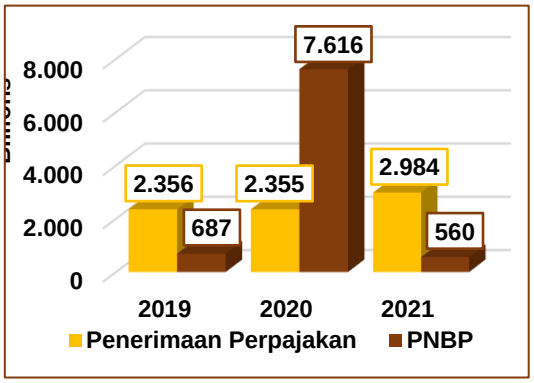

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah (diolah)

Pajak dalam negeri masih menjadi andalan penyumbang pendapatan perpajakan dengan proporsi yang sangat besar yaitu 92,76 persen sedangkan sisanya sebesar 7,24 persen merupakan sumbangan pajak perdagangan internasional. Sementara dalam pendapatan PNBP, kontribusi pendapatan disumbang oleh komponen PNBP Lainnya dengan proporsi mencapai 43,28 persen atau senilai Rp242,42 miliar dari seluruh pendapatan PNBP.

2. Analisis Perubahan Penerimaan Perpajakan

Grafik 4.2. Perbandingan Proporsi Sumber Penerimaan Konsolidasian (miliar)

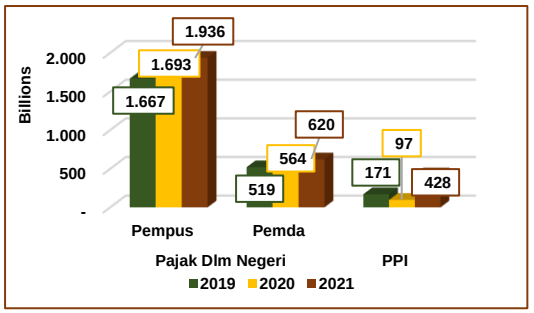

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah

Penerimaan perpajakan konsolidasian sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp2,98 triliun, naik 26,7 persen dibanding periode sama Tahun 2020. Penerimaan pajak konsolidasian ini terdiri dari pajak pemerintah pusat sebesar Rp1,93 triliun, pajak pemda Rp620 miliar dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp428miliar.

Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan penerimaan pajak dalam negeri sebesar 13,23 persen atau Rp298 miliar dibanding periode yang sama tahun yang lalu. Kenaikan tersebut utamanya dikarenakan adanya kenaikan pendapatan Pajak Pemerintah Pusat sebesar Rp243 miliar dan pemerintah daerah sebesar Rp56 miliar. Perubahan proporsi sumber penerimaan pajak Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada grafik 4.2 di atas.

B. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Struktur belanja pemerintah konsolidasian daerah Sulawesi Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 didominasi oleh belanja pemerintah daerah dengan proporsi sebesar 63,57 persen sedangkan sisanya sebesar 36,43 persen disumbang belanja pemerintah pusat. Sementara pada sisi belanja transfer konsolidasian, pada Triwulan II Tahun 2020 secara agregrat, Provinsi Sulteng membelanjakan anggaran transfer sebesar Rp1,18 triliun, dengan rincian Belanja Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah sebesar Rp767 miliar dan Belanja Transfer Antar Pemerintah Daerah sebesar Rp412,4 miliar.

Grafik 4.3. Proporsi dan Perbandingan Jenis Belanja Konsolidasian 2019 - 2021

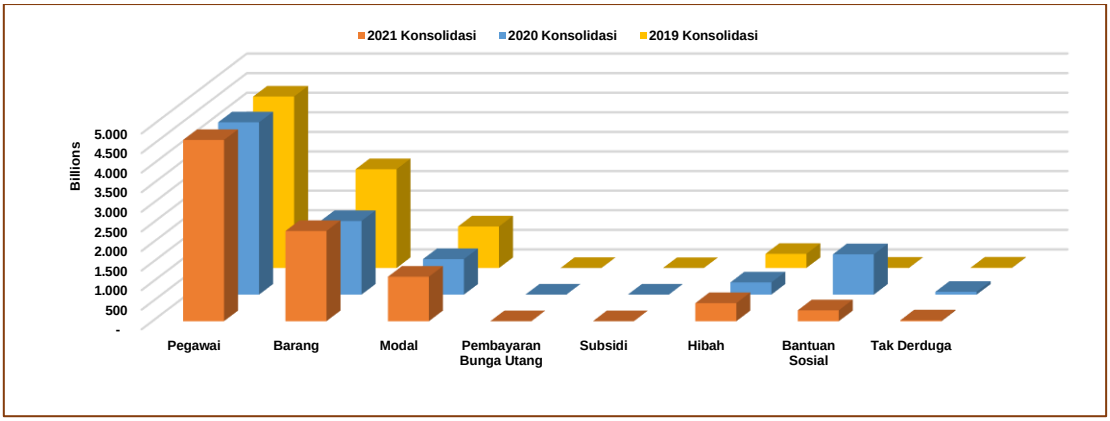

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah (diolah)

2. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) ADHB terhadap pertumbuhan ekonomi Triwulan II Tahun 2021 sebesar 8,87 persen, turun sebesar 2,07 persen dibanding periode yang sama tahun lalu dengan kontribusi sebesar 10,94 persen. Jika hal ini dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi di Sulteng, maka penurunan Kontribusi Belanja Pemerintah Konsolidasian berdampak lurus terhadap kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulteng.

Tabel 4.2. Realisasi Belanja Konsolidasian dan Kontribusi PKP Triwulan II Tahun 2020 dan 2021

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan
Pertumbuhan Ekonomi	15,39	-0,06	15,45%
Belanja Pemerintah Konsolidasian	8,82 T	8,59 T	2,7%
Kontribusi PKP	8,87%	10,94%	-2,07%

BPS Sulteng, LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah, (diolah)

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Agregat

Ringkasan Laporan Operasional merupakan salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulteng Triwulan II Tahun 2021 seperti tersaji dalam Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2021

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto		Jumlah
I	**Pendapatan:**	**13.611.671.706.061,4**
a.	Pajak	2.353.812.051.123,0
b.	Kontribusi sosial	0
c.	Hibah	190.187.522.771,0
d.	Pendapatan Lain	11.067.672.132.167,4
	Beban:	**9.518.389.541.320,8**
a.	Kompensasi Pegawai	4.421.997.665.895,0
b.	Penggunaan Barang dan Jasa	1.680.571.046.905,5
c.	Konsumsi Aset Tetap	898.013.892,2
d.	Bunga	250.000.000,0
e.	Subsidi	0
f.	Hibah	2.113.096.157.122,7
g.	Manfaat Sosial	1.028.723.424.309,0
h.	Beban Lainnya	272.853.233.196,4
II	**Keseimbangan operasi neto/bruto**	**4.093.282.164.740,7**
	Transaksi Aset Non Keuangan Neto	**906.050.977.645,3**
a.	Aset Tetap	830.275.386.948,3
b.	Persediaan	0
c.	Barang Berharga	0
d.	Aset Non Produksi	75.775.590.697,0
III	**Net Lending/Borrowing**	**3.187.231.187.095,4**
	Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban	
a.	Akuisisi Neto Aset Keuangan	2.608.000.000,0
	- Domestik	2.608.000.000,0
b.	Keterjadian Kewajiban	-1.335.483.366,7
	PDRB ADHB	60.415.000.000.000,0
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G)	7.132.190.151.001,7
	Kontribusi Belanja Pemerintah thd PDRB	11,81%
	PMTB = II.a	830.275.386.948,3
	Kontribusi Investasi thd PDRB	1,37%

Sumber: LO-LKPK Kanwil DJPb (diolah)

Berdasarkan tabel 4.3. di atas, kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB Tahun 2021 sebesar 11,81 persen. Sementara itu, kontribusi Investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah 1,37 persen. Dari perhitungan di atas juga dapat diketahui bahwa belanja pemerintah mempunyai kontribusi 8,5 kali lebih besar dibandingkan investasi pemerintah. Dengan kata lain, belanja pemerintah mempunyai kontribusi yang relatif besar dan berdampak waktu yang lebih cepat terhadap perekonomian dibandingkan dengan investasi, terutama terkait dengan pengadaan aset tetap.

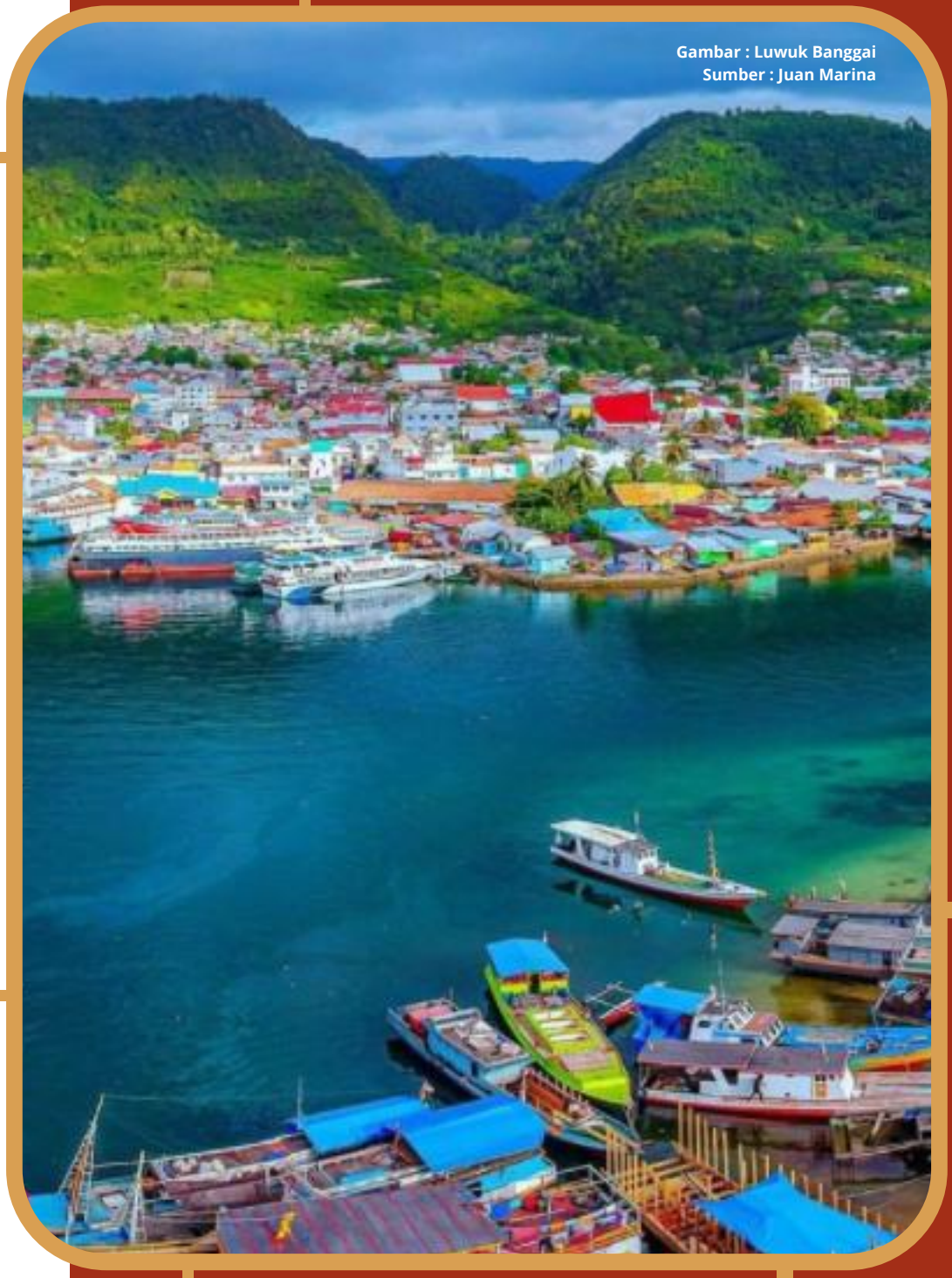

Gambar : Luwuk Banggai
Sumber : Juan Marina

BAB V

BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

RINGKASGRAFIS BAB V

Perikanan sebagai Sektor Potensial dalam Peningkatan PAD

RATA-RATA NILAI TUKAR SEKTOR 5 TAHUN TERAKHIR

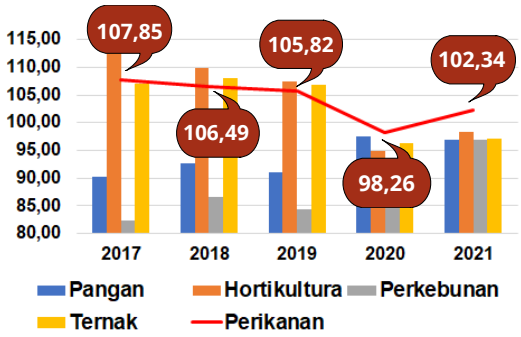

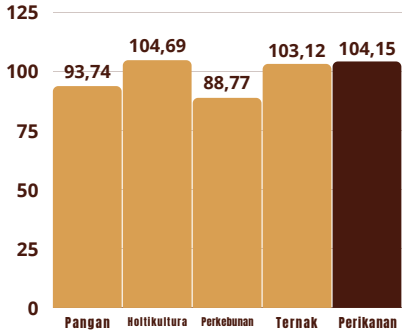

Target PAD Perikanan Tahun 2021 adalah sebesar Rp5.898.728.000 dengan usulan perubahan target sebesar Rp12.804.878.000. Realisasi PAD Perikanan s.d. 30 Juli 2021 adalah sebesar Rp10.509.934.000

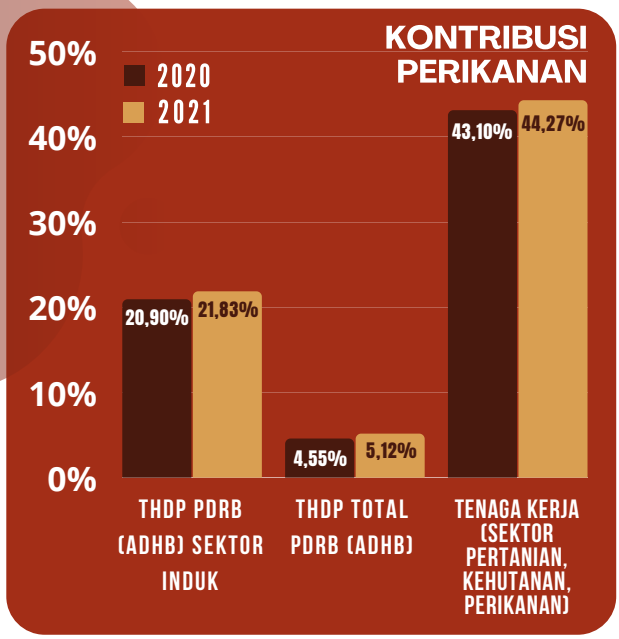

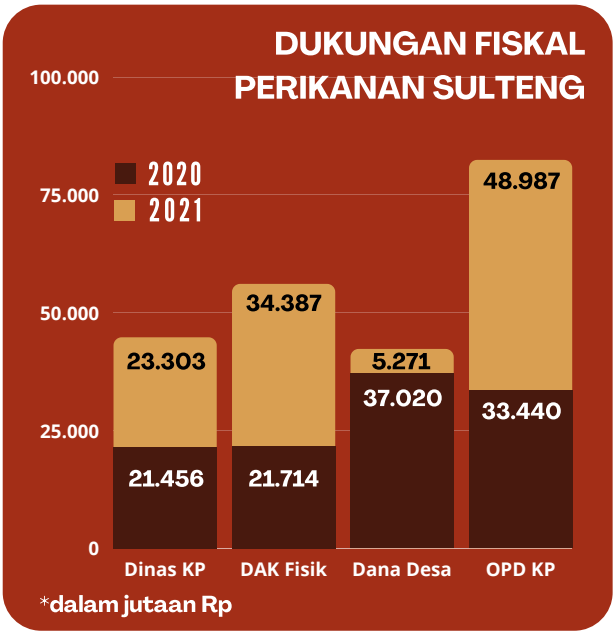

PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK SEKTOR PERIKANAN S.D. SEMESTER I TAHUN 2021

Target 2025

- Peningkatan PAD Perikanan sebesar 43%
- Turunnya Kemiskinan dari 13,5% menjadi 5,90%
  - Produksi Udang Vaname sebanyak 110 ribu ton
  - Produksi Rumput Laut pertahun 1,2 juta ton

KEBUTUHAN : INVESTASI

- Unit *hatchery* untuk benih;
- Pakan udang lokal;
- Kincir Air kurang lebih 75.000 unit pertahun;
- Unit *cold storage* kurang lebih 5 unit; dan
- Pengembangan pabrikasi *semi-refined carrageenan* (SRC) untuk rumput laut.

BAB V
BERITA/ ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

Perikanan Sebagai Sektor Potensial Alternatif Dalam Meningkatkan PAD dan Mengurangi Dependensi SultengTerhadap Sektor Pertambangan

Meskipun pandemi Covid-19 belum mereda, ekonomi Sulawesi Tengah pada Triwulan II Tahun 2021 (yoy) mampu tumbuh mencapai dua digit (15,39 persen). Raihan tersebut melebihi ekspektasi banyak kalangan yang awalnya memperkirakan pertumbuhan pada kuartal II akan berkisar pada angka 6-8 persen. Capaian tersebut sekaligus mengulang pencapaian periode yang sama lima tahun yang lalu di mana ekonomi Sulteng mampu tumbuh sebesar 15,56 persen (yoy). Walaupun jika ditelisik lebih dalam perekonomian Sulteng masih sangat bergantung kepada dua sektor lapangan usaha yaitu sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian.

Gambar 5.1. *Fishbone* Diagram Penyebab Pemilihan Sektor Perikanan Sebagai Sektor Potensial

Namun, besarnya kontribusi dalam perekonomian tersebut belum dapat memberikan dampak yang sama besarnya terhadap aspek ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan. Sejak tahun 2016 industri pengolahan dan pertambangan hanya menyumbangkan angka kepada sektor ketenagakerjaan rata-rata sebesar 7,2 persen dan 1,7 persen. Demikian pula, kontribusi tingginya pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan stagnan pada kisaran 13 persen. Oleh karenanya, sembari mengoptimalkan potensi pertambangan, Sulteng perlu mencari sektor-sektor potensial lainnya untuk dikembangkan.

Salah satu sektor yang dapat dijadikan alternatif di masa yang akan datang adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (PKP) khususnya subsektor perikanan. *Fishbone diagram* pada gambar 5.1 menunjukkan beberapa penyebab atau pendorong

dipilihnya sektor perikanan untuk dikembangkan di masa mendatang mulai dari pendorong strategis sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. Kontribusi Perikanan terhadap Kesejahteraan dan Perekonomian Sulteng

Sebagaimana ditampilkan pada tabel 5.1, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata hampir separuh (43,63 persen) masyarakat Sulteng bekerja pada sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sekaligus menjadikan sektor tersebut sebagai penyumbang terbesar ketenagakerjaan di Sulteng. Sebagai bagian dari sektor pertanian pada perhitungan PDRB menurut lapangan pekerjaan, sejak tahun 2017 subsektor perikanan memberikan kontribusi terhadap sektor induknya rata-rata sebesar 21,60 persen. Sedangkan terhadap PDRB secara keseluruhan kontribusinya adalah sebesar rata-rata 5,28 persen atau setara dengan Rp9.040 miliar.

Table 5.1. Capaian Sektor Perikanan terhadap Beberapa Indikator Perekonomian

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021*
PDRB ADHB Perikanan (miliar rupiah)	8.069	9.091	9.782	8.979	9.279
Kontribusi perikanan terhadap PDRB (ADHB) sektor induk	20,78%	21,79%	22,70%	20,90%	21,83%
Kontribusi perikanan terhadap total PDRB (ADHB)	6,02%	5,44%	5,27%	4,55%	5,12%
Nilai Tukar Perikanan	107,85	106,49	105,82	98,26	102,34
Nilai Tukar Petani Gabungan	95,04	96,82	94,98	95,28	97,44
Kontribusi Tenaga kerja (sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan)	45,18%	44,10%	41,48%	43,10%	44,27%

*angka sementara &/ asumsi dengan tren tahunan serta realisasi TW I dan TW II

Sumber: BPS Sulteng (diolah)

Kontribusi secara langsung kepada kesejahteraan masyarakat yang bekerja pada lapangan usaha ini salah satunya dapat dilihat dari capaian Nilai Tukar Nibelayan (NTN) yang menggambarkan tingkat kemampuan/daya beli nelayan dan menunjukkan daya tukar dari produksi dengan barang dan jasa yang dikonsumsi. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa NTN sejak tahun 2017 terus mengalami penurunan dan pandemi tahun 2020 membuat NTN turun di bawah angka 100 poin. Meski begitu tingkat NTN Sulteng lebih baik daripada NTP gabungan. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Tukar Perikanan lebih baik daripada Nilai Tukar Komoditas yang lain. Secara rata-rata hanya NT Holtikultura yang sedikit berada di atas NTN (data terlampir).

Subsektor perikanan juga menyumbangkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah Kelautan dan Perikanan (OPD KP). Jenis PAD perikanan hampir semuanya didapatkan dari layanan jasa pemerintah dan sewa bangunan/aset. Total realisasi PAD perikanan sejak tahun 2016 selalu mengalami pertumbuhan bahkan PAD perikanan tahun 2020 (Rp8,84 miliar) naik sebesar kurang lebih 90 persen dibandingkan tahun 2019 (Rp4,86 miliar). Kenaikan yang signifikan tersebut dipicu oleh realisasi kenaikan izin usaha perikanan yang pada tahun 2019 hanya sebesar Rp389 juta namun pada tahun 2020 berhasil ditingkatkan menjadi Rp5,7 miliar (data terlampir). Tahun 2021 Sulteng menaikkan target PAD perikanan sebesar

Rp5,89 miliar, namun target tersebut kemudian direvisi dikarenakan pada akhir Juli 2021, realisasi penerimaan telah melebihi target (Tabel 5.2).

Table 5.2. Target dan Realisasi PAD OPD Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO	Jenis Pendapatan	Target (Rp)		Realisasi Per 30 Juli 2021
		2021	Usul Perubahan 2021	
1	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah UPT. LPPMHP**	**35.000.000**	**35.000.000**	**21.970.000**
	- Sewa uji laboratorium	2.500.000	2.500.000	2.650.000
	- Penjualan Hasil Produksi bandeng konsumsi	32.500.000	32.500.000	19.320.000
2	**UPT. Pelayanan Jasa Usaha Pelabuhan Perikanan**	**2.355.000.000**	**2.735.000.000**	**1.621.193.000**
	- Wilayah I Donggala/Ogotua	1.700.000.000	2.000.000.000	1.292.137.000
	- Wilayah II Paranggi	75.000.000	100.000.000	31.535.000
	- Wilayah III Pagimana	460.000.000	460.000.000	167.191.000
	- Wilayah IV Kolonedale	120.000.000	175.000.000	130.330.000
3	**Izin Usaha Perikanan**	**2.024.000.000**	**8.551.650.000**	**8.492.166.000**
	- Tangkap	500.000.000	709.050.000	683.787.000
	- Budidaya air payau	14.000.000	45.000.000	16.240.000
	- Pengelolaan ruang laut	1.500.000.000	7.787.600.000	7.787.639.000
	- P2HP	10.000.000	10.000.000	4.500.000
4	**Penjualan Hasil Produksi Perikanan (UPTD Perbenihan)**	**1.483.228.000**	**1.483.228.000**	**374.605.000**
	- Penjualan Hasil Produksi	1.483.228.000	1.483.228.000	374.605.000
5	**Lain-lain PAD yang sah lainnya**	**1.500.000**	**-**	**-**
	- Sewa tanah dan bangunan	-	-	-
	- Sewa kantin	1.500.000	-	-
TOTAL		**5.898.728.000**	**12.804.878.000**	**10.509.934.000**

Sumber: DKP Sulteng 2021

B. Dukungan Fiskal Bagi Pembangunan Sektor Perikanan Sulteng

Dukungan pemerintah bagi sektor perikanan Sulteng pada tahun 2020 total sebesar Rp113,63 miliar yang sumber dana pembiayaannya berasal dari APBD, APBN melalui dana DKTP, Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat desa kegiatan perikanan, dan DAK Fisik bidang kelautan dan perikanan (Grafik 5.1).

Grafik 5.1. Pembiayaan Sektor Perikanan Sulteng

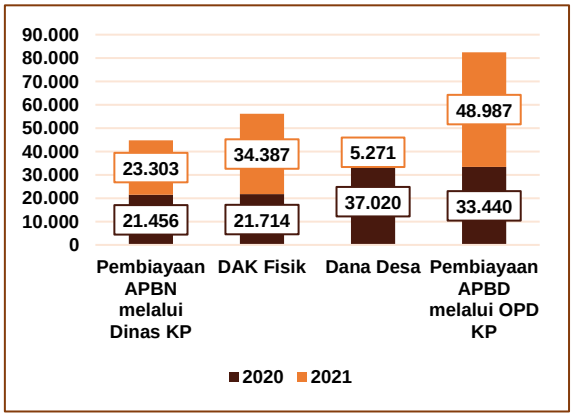

Sumber: Mebe, OMSPAN, RKPD 2020, RKPD 2021

Grafik 5.2. Penyaluran Dana Desa s.d. Smt. I 2021

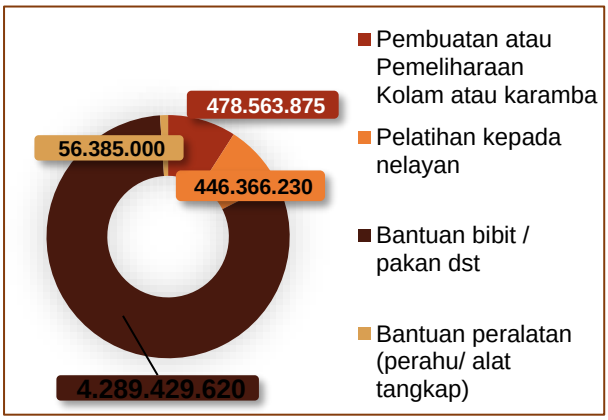

Sumber: OMSPAN (diolah)

Pada tahun 2021 pemerintah menyediakan pagu belanja dengan total sebesar Rp72, 29 miliar yang dialokasikan melalui dinas kelautan dan perikanan (sumber dana APBN dan APBD), sedangkan dana desa dan DAK Fisik yang telah terealisasi yang outputnya berkaitan dengan pemberdayaan perikanan sampai dengan bulan Juli 2021 sebesar

total Rp39,65 miliar. Penyaluran dana desa yang terkait dengan perikanan sampai dengan akhir semester I sebagian besar disalurkan dalam bentuk bantuan dan bibit sedangkan sisanya disalurkan dalam bentuk pelatihan kepada nelayan, pembuatan atau pemeliharaan kolam atau karamba serta bantuan peralatan baik perahu maupun alat tangkap (grafik 5.2).

C. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Sektor Perikanan

Dalam rangka meningkatkan pendapatan sektor perikanan maka diperlukan langkah-langkah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan.

1. Intensifikasi sumber pendapatan

Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan beberapa sumber pendapatan antara lain: (i) Izin usaha perikanan; (ii) Imbal jasa pengujian laboratorium hasil kelautan dan perikanan; (iii) Imbal jasa kepelabuhan perikanan dan penjualan; dan (iv) Penjualan hasil produksi dan pendapatan lain-lain.

2. Ekstensifikasi sumber pendapatan

Ekstensifikasi pendapatan perikanan dapat dilakukan salah satunya dengan melibatkan perusahaan daerah untuk kerja sama kemitraan seperti pada industri Udang Vaname dan Rumput Laut. Peluang usaha kedua produk ini di Sulteng cukup menjanjikan. Pada tahun 2020, produksi Udang Vaname mencapai 20.000-ton dan dalam hal produksi rumput laut saat ini Sulteng merupakan produsen rumput laut ketiga terbesar nasional setelah NTT dan Sulsel dengan produksi pada tahun 2020 sebesar 932.686 ton.

Produksi kedua industri tersebut seharusnya bisa lebih ditingkatkan mengingat Sulteng memiliki garis pantai sepanjang 660 km, namun devisa dari hasil perikanannya masih sangat kecil. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan hal tersebut antara lain dengan cara memotong jalur input produksi, memotong jalur distribusi, serta mengembangkan kebutuhan input produksi lokal. Pada Tahun 2025 nanti Sulteng menargetkan produksi udang vaname naik menjadi 100 ribu ton atau lima kali lipat dari produksi tahun 2020. Sedangkan produksi rumput laut diharapkan dapat lebih dioptimalkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang diharapkan dapat mencapai angka produksi yang stabil diatas 1,2 juta ton. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan investasi baik dari swasta maupun pemerintah dalam bentuk antara lain pengadaan unit *hatchery* untuk benih, produsen pakan udang local, kincir air sebanyak kurang lebih 75.000-unit pertahun, setidaknya 5-unit *cold storage*, pengembangan pabrikasi *semi-refined carrageenan* (SRC) untuk rumput laut.

DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diakses Tanggal 20-30 Juli 2021.

Aplikasi Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRADA). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan.

Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN). Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2021. *Berita Resmi Statistik*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2021. *Berita Resmi Statistik*. Palu: Badan Pusat Statistik.

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah. 2021. *GFS Preliminary Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2021*. Palu : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

KPP Pratama Palu. 2021. *Data dan Realisasi Perpajakan di Provinsi Sulawesi Tengah*. Palu : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

KPP Pratama Luwuk. 2021. *Data dan Realisasi Perpajakan di Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan II Tahun 2021*. Luwuk : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

KPPBC TMP C Pantoloan. 2021. *Data dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai di Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan II Tahun 2021*. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Keuangan Republik Indonesia.

KPPBC TMP C Kolonodale. 2021. *Data dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai di Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan II Tahun 2021*. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Keuangan Republik Indonesia.

Kritik, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada:

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
Jalan Tanjung Dako Nomor 15, Palu
Telepon : (0451) - 422924
Faxsimile : (0451) - 422936
Email : ppa2.kanwilpalu@gmail.com
Website : www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng

LAMPIRAN

Petumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan II 2021

Tahun / TW		Sulteng c-	Sulteng y	Sulteng q-to-q	Nasional y-on-y
2016	Q2	14,54	15,55	3,79	5,18
	Q3	12,23	7,89	(1,58)	5,02
	Q4	9,94	3,70	1,74	4,94
2017	Q1	3,93	3,93	(0,01)	5,01
	Q2	5,27	6,57	6,43	4,67
	Q3	6,41	8,68	0,38	5,06
	Q4	7,10	9,12	2,15	5,07
2018	Q1	6,63	6,63	(2,29)	5,06
	Q2	6,41	6,20	6,00	5,05
	Q3	6,63	7,05	1,18	5,17
	Q4	6,28	5,28	0,46	5,18
2019	Q1	6,54	6,54	(1,12)	5,07
	Q2	6,40	6,26	5,73	5,06
	Q3	6,31	6,10	1,07	5,02
	Q4	7,15	9,59	3,72	4,97
2020	Q1	4,92	4,92	(5,34)	2,97
	Q2	2,36	(0,06)	0,71	(5,32)
	Q3	2,51	2,82	3,98	(3,49)
	Q4	4,86	4,45	4,12	(2,19)
2021	Q1		6,26	(0,68)	(0,74)
	Q2	10,82	15,39	8,52	7,07

Inflasi Gabungan 2 (dua) Kota di Sulwesi Tengah

2020	Jan	-0,25	0,19	-0,17
	Feb	0,54	0,06	0,45
	Mar	-0,35	-0,59	-0,40
	Apr	0,17	0,54	0,24
	Mei	0,15	-0,39	0,06
	Jun	0,34	0,77	0,43
	Jul	0,16	-0,01	0,12
	Agu	0,07	0,35	0,12
	Sep	-0,1	0,18	-0,05
	Okt	0,41	-0,32	0,26
	Nov	0,04	0,32	0,09
	Des	0,63	0,26	0,46
2021	Jan	0,25	0,21	0,23
	Feb	0,16	0,06	0,12
	Mar	0,21	0,13	0,2
	Apr	0,08	0,1	0,09
	Mei	0,68	0,78	0,7
	Jun	-0.86	0,12	-0,67

Gini Ratio Sulteng

	PERKOTAAN	PERDESAAN	KOTA + DESA	Naik / Turun
Maret-14	0,406	0,305	0,372	-
Sept-14	0,406	0,283	0,352	-0,02
Maret-15	0,425	0,329	0,374	0,022
Sept-15	0,415	0,303	0,37	-0,004
Maret-16	0,387	0,32	0,362	-0,008
Sept-16	0,372	0,308	0,347	-0,015
Maret-17	0,379	0,309	0,355	0,008
Sept-17	0,367	0,313	0,346	-0,009
Maret-18	0,37	0,307	0,346	0
Sept-18	0,331	0,28	0,317	-0,029
Maret-19	0,335	0,287	0,327	0,01
Sept-19	0,339	0,292	0,33	0,003
Maret-20	0,334	0,295	0,326	-0,004
Sept-20	0,334	0,295	0,321	-0,005
Maret-21	0,343	0,279	0,316	-0,005

Jumlah Penduduk Miskin Sulteng

PERIODE	PERKOTAAN		PERDESAAN		TOTAL	
	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU ORANG)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU ORANG)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
MARET 2011	61,9	9,46	368,44	17,89	423,63	15,83
SEPTEMBER 2011	65,9	10,05	366,17	17,96	432,07	16,04
MARET 2012	61,17	9,24	357,47	17,39	418,64	15,4
SEPTEMBER 2012	60,2	9,02	349,4	16,85	409,6	14,94
MARET 2013	59,79	8,9	345,63	16,53	405,42	14,67
SEPTEMBER 2013	64,37	9,45	336,04	15,89	400,41	14,32
MARET 2014	67,08	9,77	325,57	15,27	392,65	13,93
SEPTEMBER 2014	71,65	10,35	315,41	14,66	387,06	13,61
MARET 2015	77,97	10,93	343,66	15,9	421,63	14,66
SEPTEMBER 2015	79,25	11,06	327,09	15,07	406,34	14,07
MARET 2016	75,45	10,18	345,07	15,91	420,52	14,45
SEPTEMBER 2016	75,9	10,07	337,25	15,48	413,15	14,09
MARET 2017	77,98	10,16	339,88	15,54	417,87	14,14
SEPTEMBER 2017	81,56	10,39	341,72	15,59	423,27	14,22
MARET 2018	85,03	10,15	335,18	15,51	420,21	14,01
SEPTEMBER 2018	83,84	9,5	329,65	15,41	413,49	13,69
MARET 2019	84,74	9,32	352,62	14,69	410,36	13,48
SEPTEMBER 2019	81,46	8,9	322,57	15,01	404,03	13,18
MARET 2020	80,73	8,76	318	14,69	398,73	12,92
SEPTEMBER 2020	87,43	9,21	316,31	14,76	403,74	13,06
MARET 2021	88,31	9,15	316,14	14,73	404,44	13

Tingkat Kedalaman dan Keparahan Sulteng

		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021
		Mar	Sept	Maret	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar
Kedalaman	Kota	1,78	1,41	1,89	1,93	2,05	1,85	2,02	1,3	1,43	1,98	1,68	1,83	1,55
	Desa	2,76	2,69	3,01	2,4	2,73	3,14	2,88	2,68	2,71	3,71	2,96	3,2	2,82
	Kota+Desa	2,52	2,37	2,72	2,28	2,55	2,8	2,64	2,28	2,33	3,19	2,58	2,78	2,43
Keparahan	Kota	0,43	0,32	0,53	0,56	0,62	0,46	0,57	0,42	0,32	0,54	0,43	0,43	0,41
	Desa	0,74	0,7	0,79	0,56	0,76	0,9	0,8	0,78	0,76	1,41	0,92	1,07	0,75
	Kota+Desa	0,66	0,6	0,73	0,56	0,72	0,78	0,74	0,68	0,63	1,15	0,77	0,87	0,64